

Katalog: 4102002.75

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

PROVINSI GORONTALO

2017



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI GORONTALO**



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

PROVINSI GORONTALO

2017



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI GORONTALO 2017

ISSN : 2598-6937
Nomor Publikasi : 75550.1805
Katalog : 4102002.75
Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : xvi + 64 halaman

Naskah:

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
BPS Provinsi Gorontalo

Gambar Kulit:

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
BPS Provinsi Gorontalo

Diterbitkan Oleh:

© Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Pengarah

Eko Marsoro

Editor

Suri Handayani

Penulis dan Pengolah Data

Dewi Permana Sari

Desain Cover

Dewi Permana Sari

Desain Layout

Dewi Permana Sari



Gorontalo, Juli 2017

Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Gorontalo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eko Marsoro', with a horizontal line underneath.

Eko Marsoro

Indeks Pembangunan Manusia sebagai indikator ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan penghidupan yang layak. Semua indikator yang merepresentasikan ketiga dimensi ini terangkum dalam satu nilai tunggal, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Angka IPM disajikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Penyajian IPM menurut daerah memungkinkan setiap provinsi dan kabupaten/kota mengetahui peta pembangunan manusia baik pencapaian, posisi, maupun disparitas antar daerah. Dengan demikian, maka diharapkan setiap daerah dapat terpacu untuk berupaya meningkatkan kinerja pembangunan melalui peningkatan kapasitas dasar penduduk.

Capaian pembangunan manusia di Provinsi Gorontalo dalam tujuh tahun terakhir (2010-2017) menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dengan laju pertumbuhan yang berbeda-beda di setiap kabupaten/kota.

Semoga publikasi "Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Gorontalo 2017" ini bermanfaat bagi semua kalangan yang berkepentingan, termasuk masyarakat pengguna sebagai bahan rujukan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan publikasi ini.

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
RINGKASAN EKSEKUTIF	xiv
BAB 1	
1	KONSEP DAN PENGUKURAN PEMBANGUNAN MANUSIA
3	Konsep Dasar Pembangunan Manusia
6	Pengukuran Pembangunan Manusia
7	Pertumbuhan Ekonomi atau Pembangunan Manusia yang Harus Didahulukan?
8	Pembangunan Manusia: Isu Lawas yang Selalu Hangat
BAB 2	
13	CAPAIAN PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI GORONTALO
15	Penduduk sebagai Modal dan Target Pembangunan
16	Capaian Pembangunan Manusia Provinsi Gorontalo Meningkatkan Setiap Tahunnya
BAB 3	
23	PERKEMBANGAN CAPAIAN KOMPONEN IPM PROVINSI GORONTALO
25	Tiga Dimensi Dasar dalam Pembangunan Manusia
26	Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat
30	Dimensi Pengetahuan
36	Dimensi Standar Hidup Layak

BAB 4

39 PERKEMBANGAN IPM KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI GORONTALO

- 41 Pembangunan Manusia di Level Kabupaten/Kota
- 43 Tingkat Kesenjangan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Mengecil
- 44 Dimensi Kesehatan Kabupaten/Kota
- 45 Dimensi Pendidikan Kabupaten/Kota
- 48 Dimensi Hidup Layak Kabupaten/Kota

KESIMPULAN ● 51

DAFTAR PUSTAKA ● 55

CATATAN TEKNIS ● 57

Tabel 3.1	Distribusi Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Melahirkan Hidup dalam Dua Tahun Terakhir Menurut Provinsi dan Penolong Persalinan (persen), 2014-2017.....	27
Tabel 3.2	Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas di Provinsi Gorontalo (unit), 2010-2016.....	29
Tabel 4.1	IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, 2010-2017.....	42

<https://gorontalo.bps.go.id>

Gambar 1.1	Perjalanan Metodologi Perhitungan IPM di UNDP.....	6
Gambar 1.2	<i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	9
Gambar 2.1	Perkembangan Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Gorontalo (jiwa), 2010-2017.....	15
Gambar 2.2	Capaian dan Pertumbuhan (persen) IPM Provinsi Gorontalo, 2010-2017.....	17
Gambar 2.3	Capaian dan Pertumbuhan (persen) IPM Provinsi Gorontalo dan IPM Indonesia, 2010-2017	17
Gambar 2.4	Pertumbuhan IPM di 34 Provinsi di Indoensia (persen), 2017.....	18
Gambar 2.5	Capaian IPM 34 Provinsi di Indoensia, 2017.....	20
Gambar 2.6	Disparitas/Kesenjangan IPM Kabupaten/Kota di 34 Provinsi, 2017.....	21
Gambar 3.1	Capaian (tahun) dan Pertumbuhan (persen) Umur Harapan Hidup Saat Lahir di 34 Provinsi, 2017.....	26
Gambar 3.2	Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum Bersih (persen), 2017.....	28
Gambar 3.3	Umur Harapan Hidup (UHH) Saat Lahir di 34 Provinsi (tahun), 2017.....	30
Gambar 3.4	Rata-rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih Pekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Gorontalo, 2016	31
Gambar 3.5	Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Provinsi Gorontalo (tahun), 2010-2017.....	32
Gambar 3.6	Harapan Lama Sekolah di 34 Provinsi (tahun), 2017.....	33
Gambar 3.7	Rata-rata Lama Sekolah di 34 Provinsi (tahun), 2017.....	35
Gambar 3.8	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan dan Pertumbuhannya Provinsi Gorontalo (ribu rupiah/kapita/tahun), 2010-2017.....	36
Gambar 3.9	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan di 34 Provinsi di Indonesia (ribu rupiah/kapita/tahun), 2017.....	37
Gambar 4.1	Capaian IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, 2017.....	41
Gambar 4.2	Rata-rata Pertumbuhan per Tahun Periode 2010-2017 IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo	42
Gambar 4.3	Disparitas IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, 2010-2017.....	44
Gambar 4.4	Umur Harapan Hidup Saat Lahir Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo (tahun), 2017.....	44
Gambar 4.5	Perkembangan Umur Harapan Hidup Saat Lahir Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo (tahun), 2017.....	45
Gambar 4.6	Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo (tahun), 2010-2017.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.7	Perkembangan Disparitas Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo (tahun), 2010-2017.....	47
Gambar 4.8	Perkembangan Disparitas Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo (tahun), 2010-2017.....	47
Gambar 4.9	Pengeluaran per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo (ribu rupiah/tahun), 2017.....	48
Gambar 4.10	Rata-rata Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Periode 2010-2017 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.....	48

<https://gorontalo.bps.go.id>

Pembangunan manusia sesungguhnya memiliki makna yang sangat luas. Namun sebenarnya, ide dasar dari pembangunan manusia cukup sederhana, yaitu menciptakan pertumbuhan positif dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan, serta perubahan dalam kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, manusia harus diposisikan sebagai kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Dengan berbekal konsep ini, tujuan utama dari pembangunan manusia harus mampu menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (*Human Development Report 1990*).

Pendekatan pembangunan manusia lebih memfokuskan kepada perluasan pilihan masyarakat untuk hidup dengan bebas dan bermartabat. Pembangunan manusia melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat—pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik ataupun nilai-nilai kultural—dari sudut pandang manusia. Pembangunan manusia juga mencakup isu penting lainnya, yaitu gender. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua aspek kehidupan manusia.

Aktualisasi konsep pembangunan manusia melahirkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diperkenalkan pertama kali oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990. Indonesia mulai menghitung IPM pada tahun 1996. Sejak saat itu, IPM dihitung secara berkala setiap tiga tahun. Namun, sejak 2004 IPM dihitung setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan Kementerian Keuangan dalam menghitung Dana Alokasi Umum (DAU). Indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM di Indonesia sampai saat ini meliputi angka harapan hidup saat lahir yang mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang mewakili dimensi pengetahuan, serta pengeluaran per kapita yang mewakili dimensi standar hidup layak.

Konsep pembangunan manusia tidak berdiri sendiri sebagai sesuatu yang eksklusif. Konsep pembangunan yang ada masih berkaitan dengan konsep pembangunan manusia. Pembangunan manusia bukan hanya produk dari pembangunan manusia. Pembangunan manusia bukan hanya produk dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sekaligus merupakan input penting untuk pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia harus berjalan beriringan secara simultan.

Pembangunan manusia selalu menjadi isu penting dalam perancangan dan strategi pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2015, *Millenium Development Goals* (MDGs) memasuki batas tahun pencapaian. Agenda MDGs tidak akan berhenti di tahun 2015, namun berlanjut dengan mengembangkan konsep dalam konteks kerangka/agenda

pembangunan pasca 2015, yang disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs). Konsep SDGs ini terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu *depletion* sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. SDGs dirancang dengan menggunakan tiga pilar, dirincikan kembali ke 17 tujuan yang harus dicapai. Dalam 17 tujuan tersebut, terdapat beberapa target yang berhubungan dengan pembangunan manusia, yaitu tujuan ketiga, tujuan keempat, dan tujuan kedelapan. Tujuan ketiga adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia. Tujuan keempat adalah menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Sedangkan tujuan kedelapan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

Badan Pusat Statistik juga melakukan penghitungan IPM sejak tahun 1996. Seiring dengan perkembangan pembangunan, perubahan metodologi pun beberapa kali dilakukan untuk dapat menghasilkan angka IPM yang lebih representatif. Sampai akhirnya, pada tahun 2014 BPS merilis angka IPM dengan metode baru dengan penyajian angka dari tahun 2010.

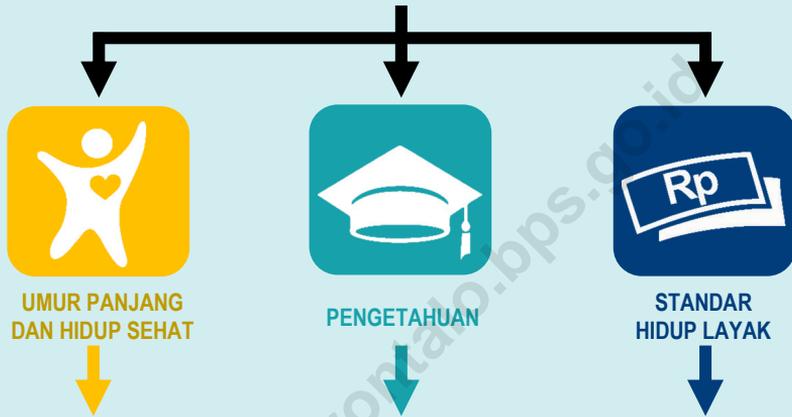
IPM Gorontalo tahun 2017 telah mencapai 67,01, meningkat sebesar 1,09 persen dari tahun sebelumnya. Tahun ini, angka harapan hidup saat lahir di Gorontalo sudah mencapai 67,14 tahun. Artinya, harapan hidup bayi yang baru lahir dapat bertahan hidup hingga usia 67,14 tahun. Secara rata-rata, penduduk Gorontalo usia 25 tahun ke atas sudah menempuh 7,28 tahun masa sekolah atau sudah menyelesaikan pendidikan setara kelas VII. Selain itu, rata-rata penduduk usia 7 tahun yang mulai bersekolah, memiliki peluang untuk mengenyam pendidikan hingga 13,01 tahun atau setara dengan Diploma I. Tidak kalah penting, standar hidup layak Gorontalo yang diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan sudah mencapai Rp9,53 juta per kapita per tahun.

Capaian pembangunan manusia tertinggi pada level kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo dicapai oleh Kota Gorontalo dengan IPM sebesar 76,09, sedangkan capaian terendah adalah Kabupaten Gorontalo Utara dengan IPM sebesar 63,52. Secara umum, dari enam wilayah pemerintahan yang ada di Provinsi Gorontalo, satu diantaranya (Kota Gorontalo) memiliki capaian IPM berkategori "tinggi". Sementara lima wilayah lainnya masuk dalam kategori "sedang".

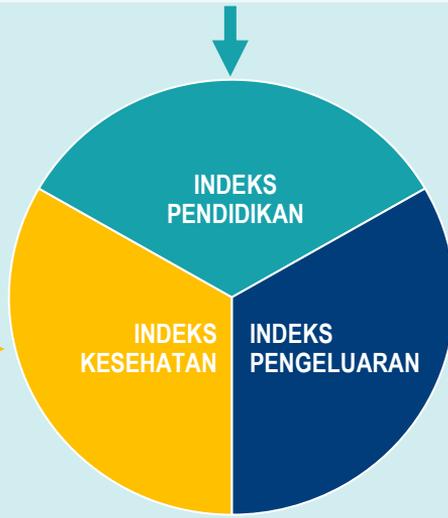
- Keamanan fisik ●
- Keluarga dan lingkungan ●
- Partisipasi politik ●
- Kebebasan berbicara ●
- Lingkungan berkelanjutan ●
- Persamaan hukum ●
- Saling menghormati ●
- Kebebasan beragama ●
- Akses teknologi ●
- Kebebasan berkespresi ●



3 DIMENSI



INDIKATOR



IPM

KONSEP DAN PENGUKURAN PEMBANGUNAN MANUSIA

1

<https://gorontalo.bps.go.id>



KONSEP DAN PENGUKURAN PEMBANGUNAN MANUSIA

1

Konsep Dasar Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia sejatinya memiliki makna yang luas. Namun, ide dasar pembangunan manusia itu sendiri yaitu pertumbuhan positif dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan, serta perubahan dalam kesejahteraan manusianya. Ide dasar ini memiliki fokus kepada manusia dan kesejahterannya. *United Nations Development Programme* (UNDP) dalam laporan pertamanya menegaskan ide ini,

“Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Oleh karena itu, tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan yang sederhana. Tetapi hal ini seringkali terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang.” (*Human Development Report 1990*)

Konsep pembangunan dan pembangunan manusia cukup berbeda. Dalam sudut pandang konvensional, pembangunan memiliki fokus utama pada pertumbuhan ekonomi, pembentukan modal manusia, pembangunan sumber daya manusia, kesejahteraan rakyat, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Model ‘pertumbuhan ekonomi’ lebih menekankan pada peningkatan pendapatan daripada memperbaiki kualitas hidup manusia. ‘Pembangunan sumber daya manusia’ cenderung untuk memperlakukan manusia sebagai input dari proses produksi sebagai alat, bukan sebagai tujuan akhir. Pendekatan ‘kesejahteraan’ melihat manusia sebagai penerima dan bukan sebagai agen dari perubahan dalam proses pembangunan. Adapun pendekatan ‘kebutuhan dasar’ terfokus pada penyediaan barang-barang dan jasa-jasa untuk kelompok masyarakat tertinggal, bukannya memperluas pilihan yang dimiliki manusia di segala bidang.

Pendekatan pembangunan manusia lebih memfokuskan kepada perluasan pilihan masyarakat untuk hidup dengan bebas dan bermartabat. Pembangunan manusia lebih memfokuskan kepada perluasan pilihan masyarakat untuk hidup dengan bebas dan bermartabat. Pembangunan manusia melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat—pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik ataupun nilai-nilai kultural—dari sudut pandang manusia. Pembangunan manusia juga mencakup isu penting lainnya, yaitu gender. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua sektor.

Kotak 1.1 Konsep Dan Definisi

Pembangunan manusia adalah proses perluasan pilihan masyarakat. Pada prinsipnya, pilihan manusia sangat banyak jumlahnya dan berubah setiap saat. Tetapi pada semua level pembangunan, ada tiga pilihan yang paling mendasar yaitu untuk berumur panjang dan hidup sehat, untuk memperoleh pendidikan dan untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber kubutuhan agar hidup secara layak. Apabila ketiga hal mendasar tersebut tidak dimiliki, maka pilihan lain tidak dapat diakses.

Pembangunan manusia tidak hanya sebatas hal tersebut. Pilihan tambahan, mulai dari politik, kebebasan ekonomi dan sosial sehingga memiliki peluang untuk menjadi kreatif dan produktif, dan menikmati harga diri pribadi dan jaminan hak asasi manusia.

Pembangunan manusia memiliki dua sisi. Pertama, pembentukan kapabilitas manusia seperti peningkatan kesehatan, pendidikan, dan kemampuan. Kedua, penggunaan kapabilitas yang mereka miliki, seperti untuk menikmati waktu luang, untuk tujuan produktif atau aktif dalam kegiatan budaya, sosial, dan urusan politik. Apabila skala pembangunan manusia tidak seimbang, kemungkinan akan terjadi ketidakstabilan.

Berdasarkan konsep pembangunan manusia, pendapatan merupakan salah satu pilihan yang harus dimiliki. Akan tetapi, pembangunan bukan sekadar perluasan pendapatan dan kesejahteraan. Pembangunan manusia harus memfokuskan pada manusia.

Sumber: HDR 1990 halaman 10

Beberapa ahli juga mengemukakan konsep pembangunan manusia yang menyiratkan bahwa pembangunan manusia memiliki aspek yang lebih luas dibandingkan dengan pembangunan konvensional. Amartya Sen (1989) misalnya, mendefinisikan pembangunan manusia sebagai perluasan kebebasan nyata yang dinikmati oleh manusia. Kebebasan bergantung pada faktor sosial ekonomi seperti akses pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan politik. Pembangunan manusia adalah cara dan tujuan akhir. Mahbub ul Haq (1995) juga mengemukakan hal serupa. Ia berpendapat bahwa pembangunan manusia merupakan proses perluasan pilihan yaitu kebebasan berpolitik, partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, pilihan untuk berpendidikan, bertahan hidup dan sehat, serta menikmati standar hidup layak.

Banyak sekali konsep yang dikemukakan mengenai pembangunan manusia, sama halnya dengan makna pembangunan manusia itu sendiri. Pembangunan manusia memiliki makna yang luas mencakup kehidupan sosial manusia seperti kehidupan berpolitik. Kebebasan dan hak asasi manusia juga tercakup di dalamnya. Lebih spesifik lagi, kebebasan berpolitik adalah kemampuan untuk berkomunikasi tanpa rasa malu atau secara bebas. Pembangunan manusia juga merupakan pembangunan dari manusia dan oleh manusia (Neamtu Daniela & Ciobanu Oana, 2015).

Kotak 1.2 Definisi Pembangunan Manusia

- Pembangunan manusia berarti perluasan pilihan masyarakat untuk hidup penuh dengan kebebasan dan bermartabat, serta perluasan kapabilitas untuk memenuhi aspirasi.
- Pembangunan manusia berarti perubahan positif pada manusia seutuhnya, fokus pada masyarakat dan kesejahteraannya, serta pembangunan manusia adalah tujuan akhir dari segala macam pembangunan.

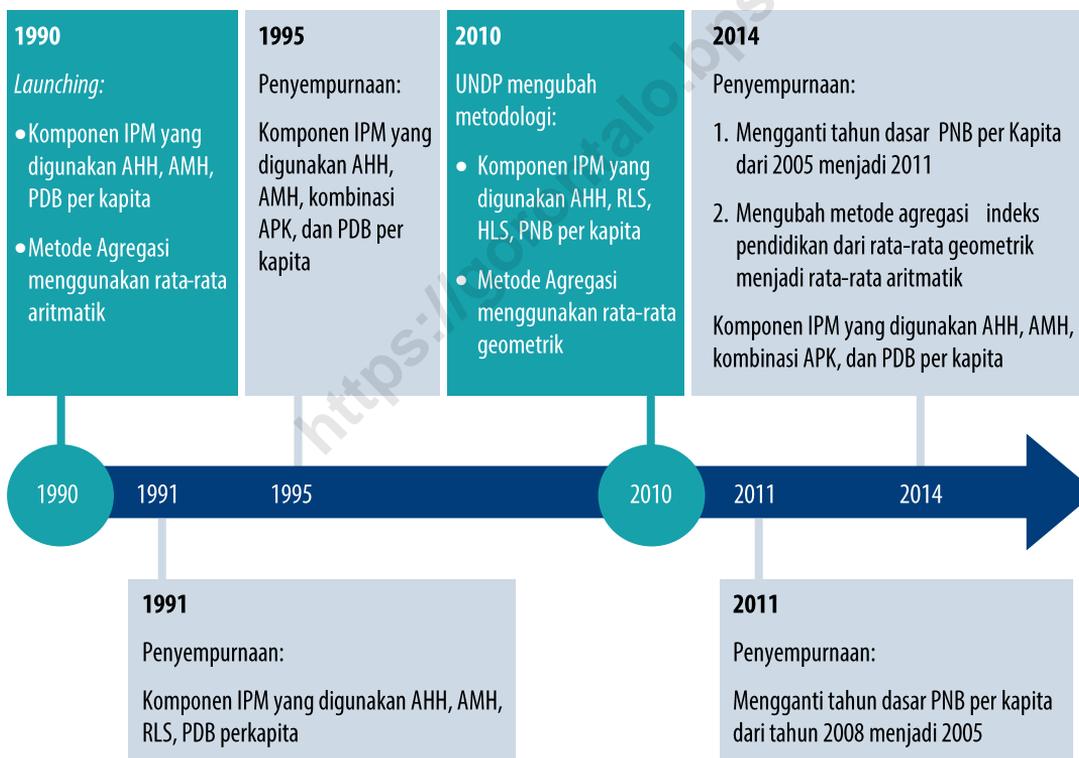
Berdasarkan beberapa konsep pembangunan manusia yang ada, UNDP mendefinisikan pembangunan manusia dalam *Human Development Report* 1996 sebagai proses dimana masyarakat dapat memperluas berbagai pilihan-pilihannya. Pendapatan merupakan salah satu faktor penentu pilihan, tetapi faktor yang tidak kalah penting lainnya adalah kesehatan, pendidikan, lingkungan fisik yang baik serta kebebasan dalam bertindak. UNDP juga menyampaikan dalam laporannya mengenai dimensi dalam pembangunan manusia, yaitu:

- Pemberdayaan yang dipengaruhi oleh kapabilitas, setiap orang bebas untuk melakukan sesuatu tetapi jika tidak memiliki kapabilitas maka tidak akan menikmati kebebasan tersebut.
- Dengan bekerja sama maka akan tercipta perluasan pilihan seseorang. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya fokus pada individual tetapi pada bagaimana kehidupannya.
- Kesetaraan yang bermakna kesamaan peluang atau kesempatan. Keberlanjutan yang bermakna kesamaan peluang atau kesempatan antargenerasi.
- Keamanan dari berbagai aspek tidak hanya aman dari bencana tetapi dari ancaman lainnya.

Pengukuran Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia menggunakan pengukuran yang sudah dikenalkan oleh UNDP pada tahun 1990, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada *Human Development Report* 1990 diperkenalkan tiga indikator pembentuk indeks pembangunan manusia yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dari ketiga dimensi tersebut, diturunkan empat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM, yaitu Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH), Angka Melek Huruf (AMH), gabungan angka partisipasi kasar (APK), dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita.

Gambar 1.1 Perjalanan Metodologi Penghitungan IPM di UNDP



Catatan:

- | | | | |
|-----|----------------------------------|-----|---------------------------|
| AHH | : Angka Harapan Hidup saat Lahir | APK | : Angka Partisipasi Kasar |
| AMH | : Angka Melek Huruf | HLS | : Harapan Lama Sekolah |
| RLS | : Rata-rata Lama Sekolah | PNB | : Produk Nasional Bruto |
| PDB | : Produk Domestik Bruto | | |

Sumber: Badan Pusat Statistik

Secara berkala UNDP melakukan penyempurnaan dalam penghitungan IPM. Tahun 2010, UNDP melakukan penyempurnaan kembali dengan tetap menggunakan tiga dimensi yang sama yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak namun menggunakan indikator yang berbeda, yaitu angka harapan hidup saat lahir, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Metode agregasi IPM pun mengalami penyempurnaan dari rata-rata aritmatik diubah menjadi rata-rata geometrik. Sedangkan metode agregasi untuk indeks pendidikan berubah dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmatik.

Pertumbuhan Ekonomi atau Pembangunan Manusia yang Harus Didahulukan?

Lebih dari 25 tahun IPM digunakan UNDP sebagai pengukuran pembangunan manusia. Di Indonesia, IPM digunakan sebagai dasar penentuan dana transfer pemerintah pusat, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) untuk kabupaten/kota. IPM yang digunakan untuk mengukur pembangunan manusia selama ini sebetulnya tidak sempurna seutuhnya. Banyak pihak yang menganggap pengukuran pembangunan manusia dengan menggunakan IPM ini kurang tepat. Basis ideologi dalam IPM yang bersifat egalitarian (kecenderungan cara berpikir bahwa seluruh penduduk diperlakukan oleh pemerintah ataupun mendapatkan perlakuan yang sama dari pemerintah) dan miskin terhadap pemikiran terkait teknologi merupakan salah satu kritik untuk IPM.

Jika dikaitkan kembali antara konsep pembangunan yang masih konvensional dengan pembangunan manusia, kedua konsep tersebut ternyata saling berkaitan satu sama lain. Konsep klasik pembangunan adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan hubungan dua arah (*dual causation*) (Ranis, Stewart, & Ramirez, 2000), dimana pertumbuhan ekonomi meningkatkan pembangunan manusia namun disisi lain peningkatan pembangunan manusia memungkinkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Constantini V. dan M. Salcatore (2008) mengemukakan bahwa pertumbuhan pembangunan manusia yang tinggi secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Meskipun konsep-konsep menyatakan pertumbuhan ekonomi memiliki *dual causation* dengan pembangunan manusia, pada prakteknya banyak faktor yang mempengaruhi agar *dual causation* tersebut terjadi. Boozer dkk (2003) menyatakan seberapa besar hubungan kedua bergantung kepada berbagai faktor yaitu kondisi suatu negara, lingkungan, dan kebijakan. Sedangkan Tulika dkk (2014) menyatakan hubungan pembangunan manusia dengan pertumbuhan ekonomi bersifat kondisional bergantung kepada kondisi masyarakat secara makro maupun mikro yaitu distribusi pendapatan masyarakat secara makro dan mikro.

Selain faktor yang memengaruhi agar dual causation terjadi, terdapat faktor penguat hubungan antara pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi. Ranis dkk (2000) menyampaikan bahwa faktor penguat hubungan antara pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi adalah struktur ekonomi, distribusi aset, kebijakan, social capital, investasi yang tinggi, distribusi pendapatan yang merata, dan kebijakan ekonomi yang tepat. Selain itu, faktor penguat lainnya adalah budaya, kelompok sosial dan jaringan di dalam kelompok tersebut, sifat dari institusi dan pemerintahan, kebijakan, pendidikan dalam keluarga, dll (UNDP, 1996).

“Jika memang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan dual causation, mana yang harus didahulukan?”

Pemikiran yang masih konvensional menyebutkan bahwa peningkatan pembangunan manusia akan terjadi jika pertumbuhan ekonomi sudah meningkat (Neamtu Daniela dan Clobanu Oana, 2015). Booser dkk (2003) mengemukakan pendapat yang hampir serupa. Pembangunan manusia bukan hanya produk dari pertumbuhan ekonomi namun merupakan input penting untuk pertumbuhan ekonomi. Pembangunan manusia berperan penting dalam alur pertumbuhan ekonomi. Pembangunan manusia perlu dijadikan sebagai prioritas untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pembangunan manusia untuk proses selanjutnya. Dengan demikian, pembangunan manusia harus ditingkatkan terlebih dahulu daripada pertumbuhan ekonomi. Namun hal tersebut dibantah oleh Ranis dan Steward. Ranis dan Steward (2005) menyatakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia harus berjalan beriringan secara simultan.

Pembangunan Manusia: Isu Lawas yang Selalu Hangat

Agenda Pembangunan Dunia

Isu pembangunan sempat menghangat di tahun 2015. Pada saat itu, Millenium Development Goals (MDGs) memasuki batas tahun pencapaian. MDGs merupakan referensi penting pembangunan di Indonesia. Selama 25 tahun, berbagai capaian telah diraih dan beberapa hal belum dapat dituntaskan.

Agenda MDGs memang tidak berhenti di tahun 2015, tetapi akan ada kelanjutannya. Babak baru agenda pembangunan telah mengembangkan konsep agenda pasca 2015, yang disebut *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs. Hal ini terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu berkurangnya (*depletion*) sumber daya alam, kerusakan lingkungan,

perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin (Bappenas).

Terdapat tiga pilar utama yang menjadi indikator dalam pembentukan konsep pengembangan SDGs, yaitu:

1. Indikator yang melekat pada pembangunan manusia (*Human Development*), yaitu pendidikan dan kesehatan.
2. Indikator yang melekat pada lingkungan kecilnya (*Social Economic Development*) yaitu ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan serta pertumbuhan ekonomi.
3. Indikator yang melekat pada lingkungan yang lebih besar (*Environmental Development*) berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik.

Ketiga pilar tersebut kemudian dijabarkan menjadi 17 tujuan yang harus dicapai. Dalam 17 tujuan tersebut, terdapat beberapa target yang berhubungan dengan pembangunan manusia, yaitu tujuan ketiga, tujuan keempat, dan tujuan kedelapan. Tujuan ketiga adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia. Tujuan keempat adalah menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Sedangkan tujuan kedelapan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

Gambar 1.2 Sustainable Development Goals (SDGs)



Tujuan ketiga adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia. Target 3A bertujuan mengakhiri kematian anak, kematian ibu, dan kematian akibat penyakit pada penduduk usia kurang dari 70 tahun. Jika dikaitkan dengan salah satu indikator pembentuk IPM, angka harapan hidup saat lahir secara tidak langsung akan menjadi salah satu indikator dari SDGs. Secara tidak langsung pula, angka harapan hidup saat lahir akan meningkat jika salah satu indikator SDGs yaitu angka kematian neonatal ditekan guna mencapai target tersebut.

Tujuan keempat adalah menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Pada target 4b, dinyatakan bahwa memastikan bahwa semua anak perempuan dan anak laki-laki memiliki akses ke pengembangan anak usia dini yang setara, perawatan, dan pendidikan anak usia dini sehingga mereka siap untuk pendidikan dasar. Pada target ini, diharapkan angka kelulusan baik SD, SMP, maupun SMA ditingkatkan. Secara langsung, ketika target ini dicapai maka angka rata-rata lama sekolah yang merupakan salah satu indikator penghitungan IPM akan ikut meningkat.

Sedangkan tujuan kedelapan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Dalam tujuan kedelapan, terdapat target 8a yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) minimal 7 persen per tahun di negara-negara berkembang. Salah satu Indikator dari target ini adalah meningkatkan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Dengan meningkatnya PNB per kapita, secara tidak langsung akan menaikkan pengeluaran per kapita.

Melalui SDGs, tujuan dan target pembangunan manusia terus diupayakan peningkatannya. Pada akhirnya, dapat disimpulkan pembangunan manusia dapat tercapai melalui pencapaian target SDGs.

Agenda Pembangunan dalam Nawacita

Isu pembangunan juga terus bergulir di dalam negeri. Agenda prioritas pembangunan nasional di era kepemimpinan Joko Widodo mengusung cita-cita dan semangat perjuangan Soekarno, yang disebut Nawacita. Istilah Nawacita diserap dari bahasa Sanskerta. *Nawa* berarti sembilan dan *Cita* yang berarti harapan, agenda, keinginan. Nawacita berisi sembilan agenda prioritas untuk menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Secara khusus, isu mengenai pembangunan manusia menjadi salah satu poin penting dalam agenda pemerintahan Jokowi. Butir kelima Nawacita menegaskan bahwa pemerintah akan memprioritaskan peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia. Hal itu dilakukan melalui dua program, yaitu:

1. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar”,
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah Kampung Deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.

Program Indonesia Pintar adalah salah satu program nasional (tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019) yang bertujuan untuk:

1. Meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah,
2. Meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan angka melanjutkan,
3. Menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan perdesaan, dan antar daerah,
4. Meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

Kotak 1.3 Nawa Cita: Joko Widodo-Jusuf Kalla 2014-2019

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan public pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah Kampung Deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

CAPAIAN PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI GORONTALO

2

<https://gorontalo.bps.go.id>



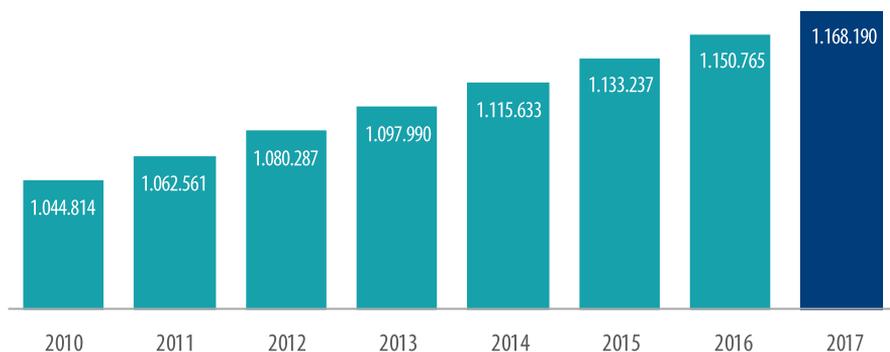
Penduduk sebagai Modal dan Target Pembangunan

Pembangunan merupakan sebuah proses yang berkesinambungan. Capaian sebuah pembangunan dapat dilihat melalui beberapa indikator perekonomian, sosial, budaya, dan lain-lain. Perekonomian, meskipun bersifat makro, masih menjadi indikator yang paling sering digunakan dalam melihat gambaran pembangunan secara umum. Namun, pada akhirnya peningkatan perekonomian tersebut tidak akan berarti jika tidak diiringi oleh peningkatan pembangunan sumber daya manusianya.

Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi dan dapat mendatangkan manfaat yang besar bila diimbangi dengan kualitas yang baik. Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas sumber daya manusia yang rendah justru akan menjadi beban dan dapat menimbulkan berbagai masalah sosial. Oleh karenanya, peningkatan pembangunan manusia sangat penting dijadikan sebagai target dan arah pembangunan. Salah satu tujuan dari pembangunan manusia adalah meningkatkan kualitas hidup penduduk. Pemerintah dianggap berhasil dalam membangun sumber daya manusia, jika kualitas hidupnya layak dan membaik setiap tahunnya.

Pada tahun 2017, jumlah penduduk Gorontalo diproyeksikan sebanyak 1.168.190 jiwa. Jumlah tersebut bertambah sebanyak 123.376 jiwa, dibandingkan potret yang diperoleh melalui Sensus Penduduk tahun 2010 (1.044.814 jiwa). Dalam kurun waktu tersebut, rata-rata laju pertumbuhan penduduk Provinsi Gorontalo mencapai 1,61 persen setiap tahunnya.

Gambar 2.1 Perkembangan Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Gorontalo (jiwa), 2010-2017



Sumber: BPS Provinsi Gorontalo

Cepat-lambatnya pembangunan Gorontalo bergantung pada modal satu juta penduduk tersebut. Dengan modal penduduk yang berkualitas tentu akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara simultan. Kualitas penduduk dapat ditinjau melalui beberapa aspek, seperti pendidikan, kesehatan, maupun tingkat kesejahteraan. Ketiga aspek inilah yang secara simultan dapat digambarkan melalui satu indeks, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Capaian Pembangunan Manusia Provinsi Gorontalo

Pemerintah daerah Provinsi Gorontalo menyadari bahwa peningkatan kualitas penduduk sangatlah penting. Tekad pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas penduduk tercermin dalam visinya, yaitu "Terwujudnya masyarakat Gorontalo yang unggul, maju dan sejahtera" yang dijabarkan ke dalam empat misi, salah satunya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta terciptanya pemerintahan yang baik dan lebih melayani. Visi dan misi tersebut kemudian dijabarkan menjadi delapan program unggulan, dimana tiga diantaranya berkaitan erat dengan peningkatan kualitas penduduk, yaitu: pendidikan yang berkualitas; kesehatan yang prima; dan ekonomi rakyat yang meningkat.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut tentu tidaklah mudah. Pasalnya, peningkatan kualitas penduduk merupakan pembangunan yang baru dapat dirasakan perubahannya dalam jangka waktu panjang. Berbagai program dan kebijakan pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas penduduk tidak serta merta dapat dirasakan dalam jangka waktu satu atau dua tahun. Oleh karenanya, program dan kebijakan tersebut harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang lama secara berkesinambungan.

Berbagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Gorontalo telah menampakkan hasilnya. IPM sebagai indikator yang mengukur perkembangan pembangunan manusia menunjukkan perubahan tersebut. Selama delapan tahun terakhir IPM Gorontalo meningkat 4,36 poin, yaitu dari 62,65 (2010) menjadi 67,01 (2017).

Gambar 2.2 Capaian dan Pertumbuhan (persen) IPM Provinsi Gorontalo, 2010-2017


Sumber: BPS Provinsi Gorontalo

Pertumbuhan IPM Gorontalo Lebih Cepat Dibandingkan IPM Indonesia

Dalam kurun 2010-2017 IPM Gorontalo rata-rata tumbuh sebesar 0,97 persen per tahun. Rata-rata pertumbuhan tersebut relatif lebih cepat dibandingkan rata-rata IPM Indonesia yang tumbuh sebesar 0,89 persen per tahun. Dalam kurun waktu tersebut, pertumbuhan IPM Gorontalo paling cepat terjadi pada periode 2010-2011, yaitu mencapai 1,34 persen. Sementara pada IPM Indonesia, pertumbuhan tercepat terjadi pada periode 2014-2015 dengan pertumbuhan sebesar 0,93 persen.

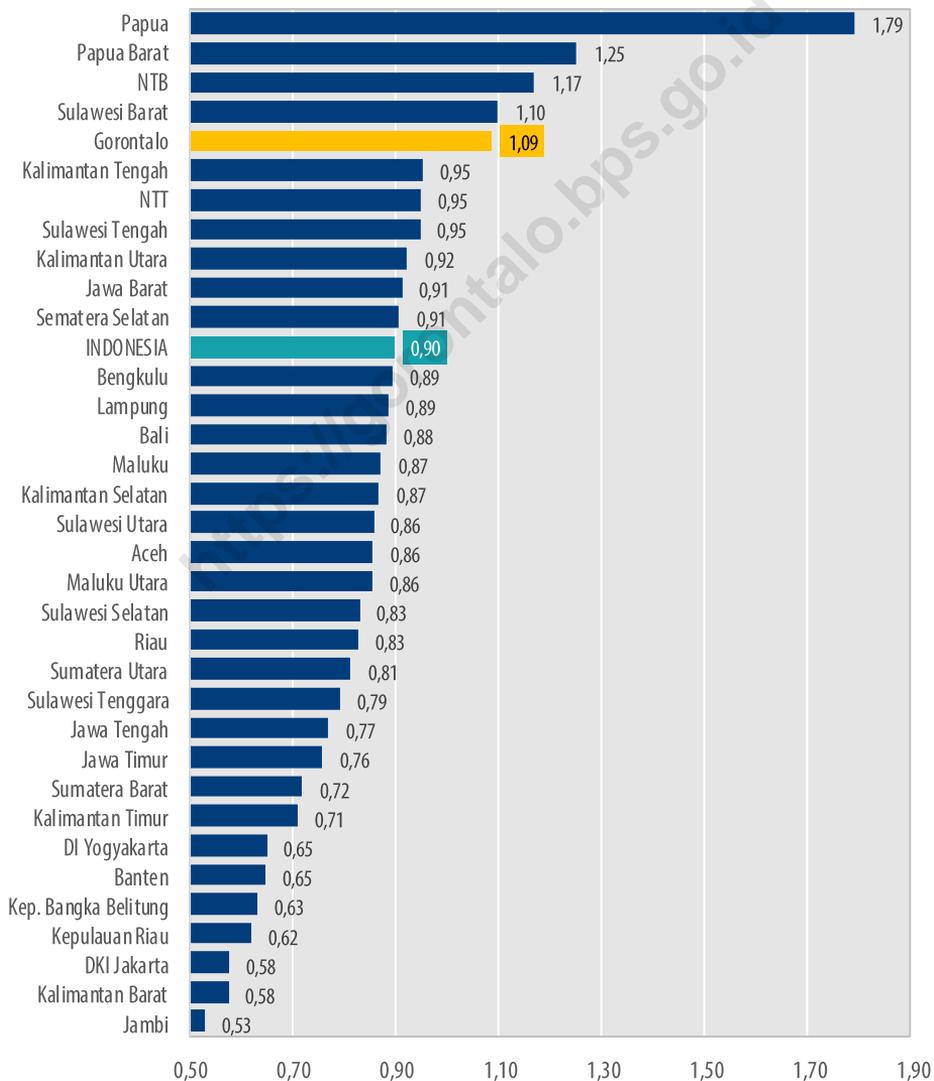
Pertumbuhan IPM merupakan tolak ukur untuk melihat kecepatan pembangunan manusia di suatu wilayah. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya.

Gambar 2.3 Capaian dan Pertumbuhan (persen) IPM Provinsi Gorontalo dan IPM Indonesia, 2010-2017


Sumber: BPS Provinsi Gorontalo

Pada tahun 2017, IPM Gorontalo tumbuh sebesar 1,09 persen, lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pada periode sebelumnya (0,66%). Pertumbuhan tersebut merupakan pertumbuhan IPM tertinggi kelima di antara 34 provinsi di Indonesia. Pertumbuhan IPM tertinggi tercatat sebesar 1,79 persen yang dicapai oleh Provinsi Papua. Sementara Jambi merupakan provinsi dengan pertumbuhan IPM terendah (0,53%).

Gambar 2.4 Pertumbuhan IPM di 34 Provinsi di Indonesia (persen), 2017



Sumber: BPS Provinsi Gorontalo

Status Pembangunan Manusia di Gorontalo

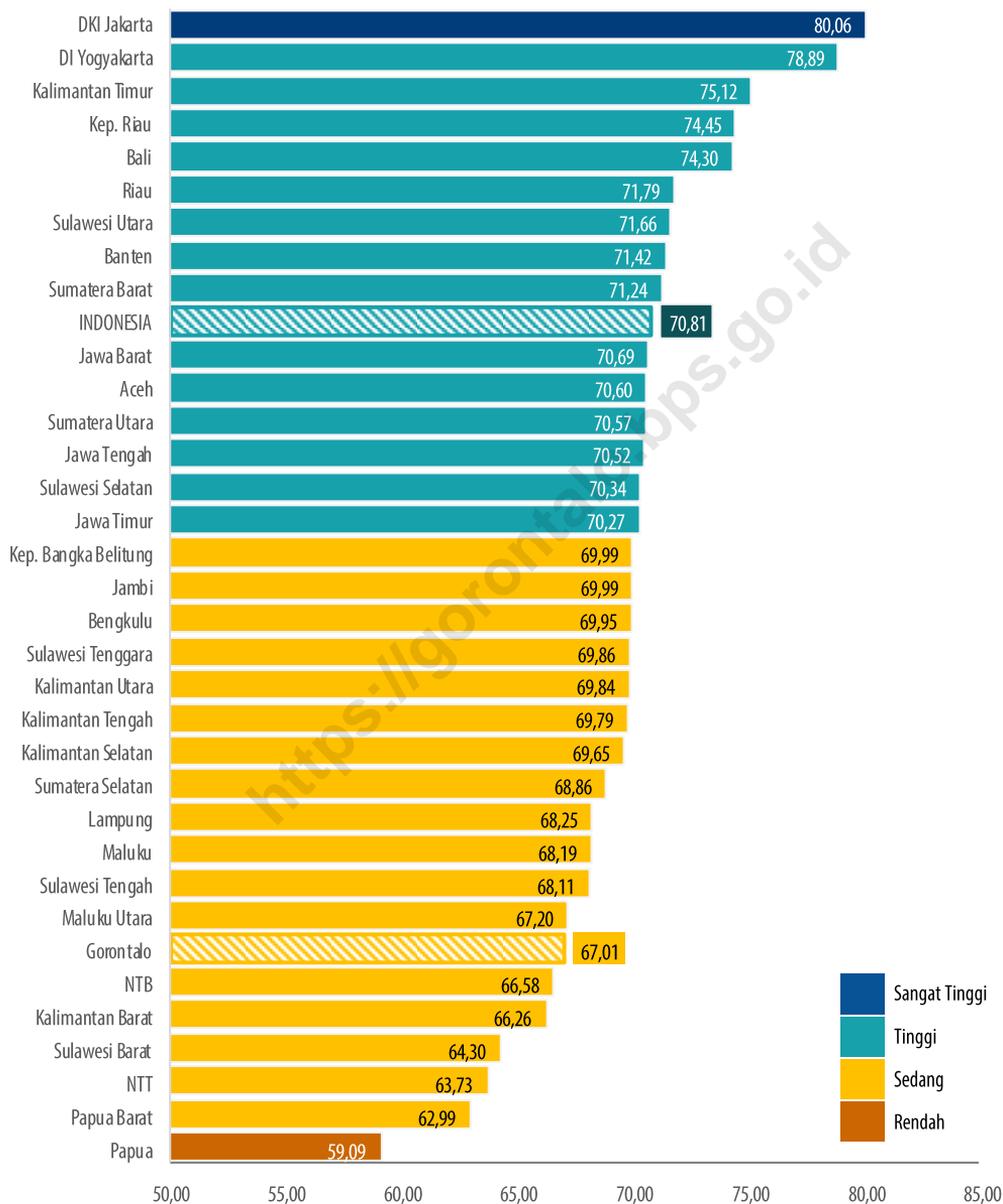
Selain pertumbuhan, status pembangunan manusia merupakan cara lain untuk melihat perkembangan pembangunan manusia. Berubahnya status pembangunan manusia dapat dijadikan indikator dalam membaca perkembangan pembangunan manusia. BPS mengelompokkan status pembangunan manusia berdasarkan IPM menjadi 4 kelompok dengan kriteria sebagai berikut:

Sangat Tinggi:	$IPM \geq 80$
Tinggi:	$70 \leq IPM < 80$
Sedang:	$60 \leq IPM < 70$
Rendah:	$IPM < 60$

Meskipun secara rata-rata pertumbuhan IPM Gorontalo cenderung lebih cepat dibandingkan nasional, namun secara level, IPM Gorontalo masih di bawah IPM Indonesia. IPM Gorontalo tahun 2017 adalah sebesar 67,01. Capaian tersebut membawa Gorontalo masuk ke dalam kategori IPM “sedang” bersama dengan 17 provinsi lainnya. Sementara itu, pada tahun yang sama IPM Indonesia telah mencapai 70,81 dan masuk ke dalam kategori “tinggi”.

Secara umum, status pembangunan manusia di semua provinsi kian membaik. Kondisi ini ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah provinsi yang masuk ke dalam kategori “tinggi”. Di tahun 2017 terdapat 14 provinsi yang telah mencapai level pembangunan manusia dengan kategori “tinggi”. Jumlah ini meningkat dibandingkan kondisi 2016, dimana saat itu hanya terdapat 12 provinsi yang masuk ke dalam kategori ini. Artinya, terdapat dua provinsi yang mengalami peningkatan status IPM dari “sedang” ke kategori “tinggi”. Namun, di sisi lain, masih terdapat Provinsi Papua dengan level pembangunan manusia yang berkategori “rendah” dengan capaian IPM sebesar 59,09.

Gambar 2.5 Capaian IPM 34 Provinsi di Indoensia, 2017

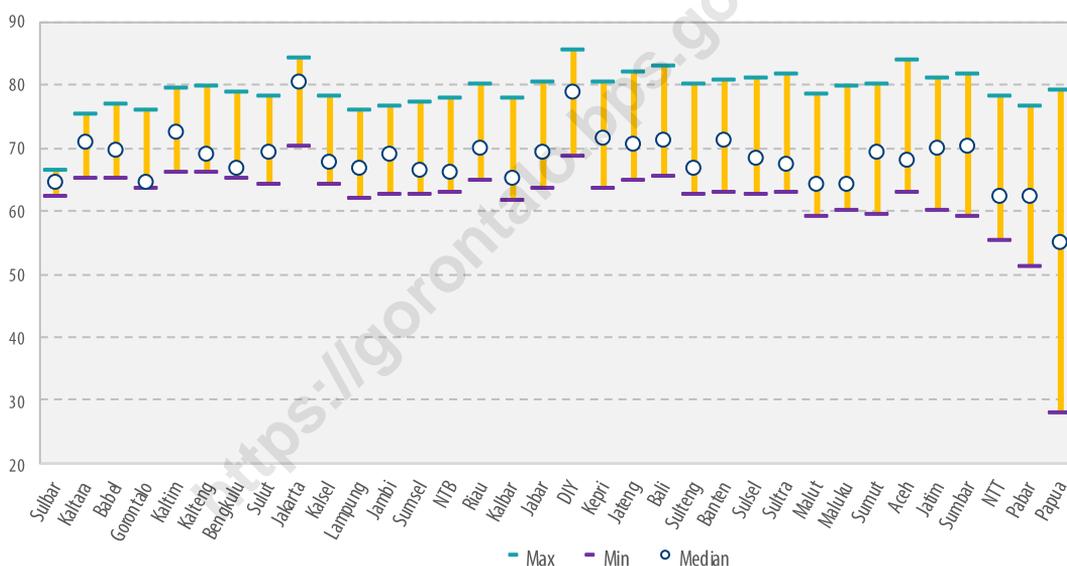


Sumber: BPS Provinsi Gorontalo

Kesenjangan Pembangunan Manusia Antar Kabupaten/Kota di Dalam Provinsi

Secara umum, tingkat kesenjangan pembangunan manusia antarkabupaten/kota di dalam Provinsi Gorontalo relatif rendah. Jika dibandingkan dengan kondisi di provinsi lain, tingkat disparitas IPM kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo menempati posisi keempat terkecil di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia antarkabupaten/kota di Provinsi Gorontalo tidak terjadi ketimpangan yang signifikan.

Gambar 2.6 Disparitas/Kesenjangan IPM Kabupaten/Kota di 34 Provinsi, 2017



Sumber: BPS Provinsi Gorontalo

Pada Gambar 2.6 terlihat bahwa nilai IPM maksimum di Provinsi Gorontalo jauh di atas nilai median dan nilai minimumnya. Pada grafik tersebut nampak bahwa nilai IPM maksimum di Provinsi Gorontalo sudah mencapai kategori “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$), sementara nilai median dan minimumnya mengumpul pada level IPM kategori “sedang” ($60 \leq \text{IPM} < 70$). Hal ini karena level capaian pembangunan manusia di Kota Gorontalo jauh lebih tinggi dibandingkan IPM lima kabupaten lain di Provinsi Gorontalo. Pada tahun 2017, IPM Kota Gorontalo sudah mencapai kategori “tinggi” (76,09), sementara IPM lima kabupaten lain masih berkategori “sedang”.

PERKEMBANGAN KOMPONEN IPM PROVINSI GORONTALO

3

<https://gorontalo.bps.go.id>



Tiga Dimensi Dasar dalam Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Ketiga dimensi ini masing-masing diwakilkan oleh beberapa indikator yang dapat merepresentasikan tingkat pembangunan pada masing-masing dimensi dan dapat diperbandingkan secara nasional dan internasional.

Dimensi umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH). UHH merupakan jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi.

Dimensi pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. HLS didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Dimensi standar hidup yang layak digambarkan oleh indikator pengeluaran per kapita disesuaikan yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi.

Peningkatan IPM Gorontalo tidak terlepas dari peningkatan yang terjadi pada setiap komponen pembentuk IPM-nya. Dalam kurun 2010-2017 semua komponen pembentuk IPM Gorontalo mengalami peningkatan dengan tingkat kecepatan pertumbuhan yang beragam.

Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Umur panjang dan sehat merupakan salah satu dimensi dalam pengukuran tingkat pembangunan manusia. Dimensi ini diwakilkan oleh indikator Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH). UHH dianggap dapat mencerminkan derajat kesehatan suatu wilayah, baik dari sarana, orasarana, akses, hingga kualitas kesehatan. UHH saat lahir merupakan manifestasi dari indikator kesehatan penduduk di suatu wilayah. UHH pada saat lahir (*life expectancy at birth*) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.

Seiring dengan upaya peningkatan derajat kesehatan, capaian UHH saat lahir di Gorontalo selama delapan tahun terakhir memperlihatkan peningkatan tiap tahunnya. Peningkatan UHH saat lahir mengindikasikan bahwa harapan hidup seorang bayi yang baru lahir untuk dapat hidup lebih lama menjadi semakin tinggi.

Dengan melihat UHH tahun 2017, dapat diperkirakan bayi yang lahir pada tahun 2017 di Gorontalo memiliki harapan untuk hidup hingga 67,14 tahun, lebih lama 0,73 tahun jika dibandingkan kondisi pada tahun 2010 (66,41 tahun). Peningkatan UHH tersebut menunjukkan adanya perbaikan tingkat kesehatan penduduk di Gorontalo. Selama delapan tahun terakhir, UHH Provinsi Gorontalo rata-rata tumbuh sebesar 0,16 persen per tahun.

Gambar 3.1 Capaian (tahun) dan Pertumbuhan (persen) Umur Harapan Hidup Saat Lahir di 34 Provinsi, 2017



Sumber: BPS Provinsi Gorontalo

Peningkatan umur harapan hidup di Gorontalo tidak lepas dari peran pemerintah daerah. Berbagai program kesehatan telah dicanangkan untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk, salah satunya dengan menekan angka kematian ibu dan bayi. Angka kematian ibu dan bayi dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu diantaranya adalah penolong proses persalinan. Asumsinya, dengan penolong kelahiran dari tenaga medis, seperti dokter dan bidan, dianggap lebih baik dibandingkan yang ditolong oleh dukun, famili, atau lainnya sehingga dapat memperkecil terjadinya kematian ibu dan bayi.

Di Gorontalo, persentase proses persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini seiring dengan gencarnya sosialisasi terkait program pemerintah yang menganjurkan untuk memanfaatkan tenaga kesehatan pada setiap proses persalinan. Program ini ditujukan untuk menekan angka kematian ibu dan bayi sehingga dapat meningkatkan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir .

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) di Gorontalo, persentase wanita usia produktif (15-49 tahun) yang pernah kawin dan melahirkan hidup, penolong persalinannya sebagian besar telah dibantu oleh tenaga kesehatan. Bahkan, persentasenya terus menunjukkan peningkatan. Tercatat, wanita yang memanfaatkan dukun sebagai penolong persalinannya terus menunjukkan penurunan dan mulai beralih ke tenaga kesehatan.

Tabel 3.1 Distribusi Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Melahirkan Hidup dalam Dua Tahun Terakhir Menurut Provinsi dan Penolong Persalinan (persen), 2014-2017

Tahun	Dokter ¹	Bidan	Tenaga Kesehatan Lain ²	Dukun	Lainnya ³	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
2014	26,36	42,79	1,10	28,82	0,93	100,00
2015	25,56	60,28	1,81	12,35	0,00	100,00
2016	27,22	60,73	1,92	10,05	0,08	100,00
2017	34,83	58,78	2,12	4,28	0,00	100,00

Catatan: ¹ Dokter kandungan dan dokter umum

² Perawat dan tenaga medis lainnya

³ Termasuk keluarga dan yang tidak tahu penolong kelahirannya

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat; BPS Republik Indonesia

Selain faktor penolong persalinan, faktor gaya hidup dan lingkungan juga berkaitan erat dengan umur harapan hidup. Seperti yang dikemukakan oleh Henrik L. Blum (www.depkes.go.id) bahwa faktor terbesar yang mempengaruhi derajat kesehatan seseorang adalah faktor lingkungan. Konsep ini menegaskan bahwa lingkungan yang baik akan mendorong secara langsung peningkatan derajat kesehatan dan secara tidak langsung akan berhubungan dengan keturunan dan pelayanan masyarakat.

Salah satu indikator yang menunjukkan kondisi lingkungan penduduk adalah indikator aksesibilitas terhadap air minum bersih. Air merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang penggunaannya nyaris hampir dibutuhkan dalam setiap aktivitas kehidupan. Oleh karena itu, ketersediaan dan akses terhadap air bersih sangat penting dan sudah tidak dapat dihindarkan.

Pada tahun 2017 tiga dari empat rumah tangga yang ada di Provinsi Gorontalo sudah menggunakan air bersih sebagai sumber air minumannya. Persentase tersebut meningkat jika dibandingkan kondisi pada lima tahun sebelumnya (2012), dimana rumah tangga yang menggunakan sumber air minum bersih baru mencapai 54,02 persen.

Gambar 3.2 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum Bersih (persen), 2017



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat; BPS Republik Indonesia

Untuk mengejar ketinggalannya, pemerintah daerah terus berupaya dalam peningkatan derajat kesehatan penduduk Gorontalo. Hal ini tercermin dari beberapa usaha pemerintah dalam menambah fasilitas kesehatan untuk masyarakat. Dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir, jumlah rumah sakit bertambah dari 7 unit (2010) menjadi 12 unit (2016). Begitu pula puskesmas-fasilitas kesehatan yang paling sering digunakan masyarakat-juga bertambah sebanyak 17 unit dalam kurun waktu yang sama.

Tabel 3.2
Jumlah Rumah Sakit dan
Puskesmas di Provinsi Gorontalo
(unit), 2010-2016

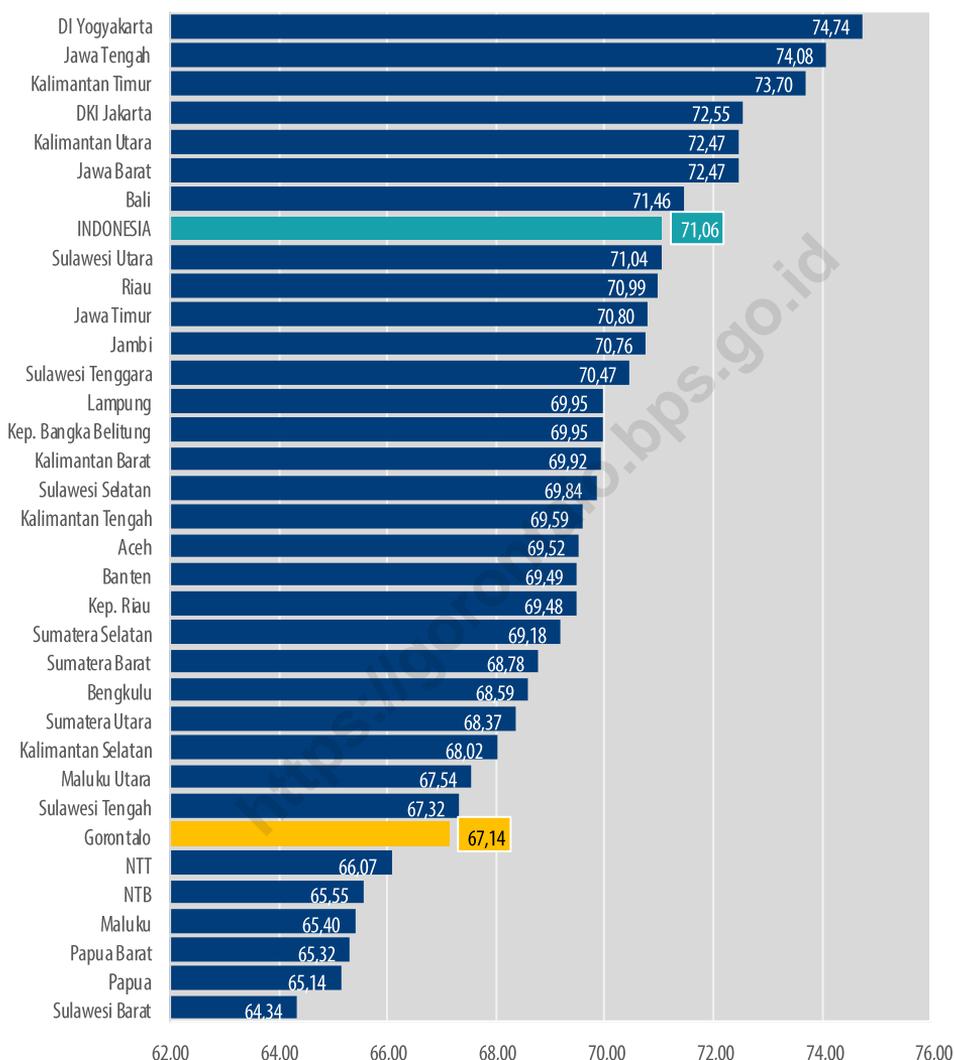
Tahun	Rumah Sakit Umum & Khusus	Puskesmas
(1)	(2)	(3)
2010	8	76
2011	9	86
2012	11	87
2013	12	91
2014	12	93
2015	12	93
2016	13	93

Sumber: Statistik Indonesia, BPS Republik Indonesia

Meskipun dari beberapa indikator kesehatan tersebut menunjukkan bahwa derajat kesehatan di Gorontalo semakin membaik, namun usaha dalam peningkatan derajat kesehatan tersebut masih perlu terus digenjut. Pasalnya, capaian UHH Gorontalo masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan capaian UHH di provinsi lain. Secara nasional, UHH Indonesia tahun 2017 telah mencapai 71,06 tahun, sementara UHH Gorontalo baru mencapai 67,14 tahun.

UHH provinsi-provinsi di kawasan Sulampua memang cenderung lebih rendah jika dibandingkan provinsi-provinsi di kawasan lain, terutama di wilayah barat Indonesia. Tidak ada satupun provinsi di kawasan Sulampua yang memiliki capaian di atas UHH nasional. Capaian UHH provinsi-provinsi di kawasan Sulampua tahun 2017 berkisar antara 64,34 tahun (Sulawesi Barat) hingga 71,04 tahun (Sulawesi Utara).

Gambar 3.3 Umur Harapan Hidup (UHH) Saat Lahir di 34 Provinsi (tahun), 2017



Sumber: BPS Provinsi Gorontalo

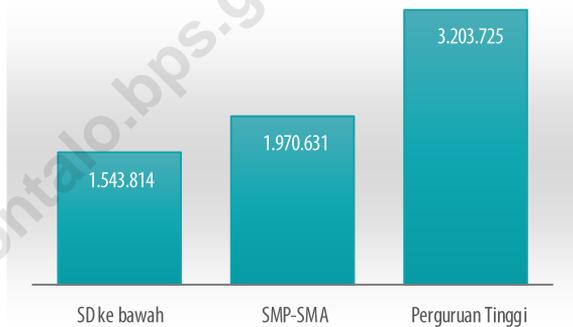
Dimensi Pengetahuan

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi setiap penduduk Indonesia. Bahkan dalam sistem kenegaraan Republik Indonesia, pendidikan menjadi salah satu poin yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Untuk itu, beberapa upaya dilaksanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Salah satunya dengan mengalokasikan hingga 20 persen dari total anggaran setiap tahunnya untuk pendidikan.

Besarnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan menunjukkan bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pembangunan. Hal ini karena pendidikan merupakan sarana penting untuk meningkatkan kualitas manusia dan dapat memperluas peluang seseorang. Manusia yang berpendidikan akan lebih memperhatikan tingkat kesehatan agar dapat hidup lebih lama dan sehat. Selain itu, manusia yang berpendidikan juga berpeluang besar untuk mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang lebih layak. Tersermin dari data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Gambar 3.4 yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berbanding lurus dengan tingkat pendapatannya.

Gambar 3.4
Rata-rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih
Pekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang
Ditamatkan di Provinsi Gorontalo, 2016

Sumber: Keadaan Pekerja Provinsi Gorontalo,
BPS Provinsi Gorontalo

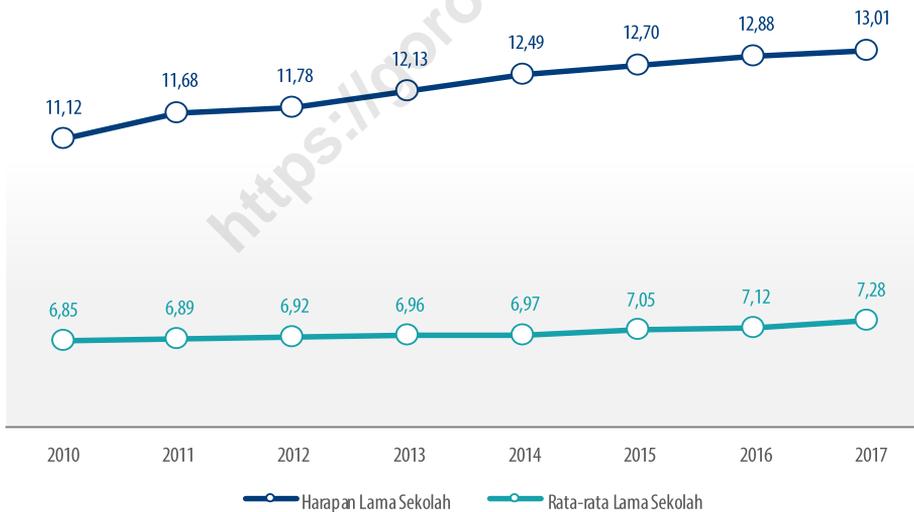


Dimensi pengetahuan dalam penghitungan pembangunan manusia terdiri dari dua indikator, yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Rata-rata Lama Sekolah adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalankan pendidikan formal. Sedangkan Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun di masa mendatang. Indikator rata-rata lama sekolah mencerminkan *output* jangka panjang atau investasi dari pembangunan pendidikan di masa lampau karena dihitung dari capaian lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas. Sementara indikator harapan lama sekolah menggambarkan tingkat keberhasilan pembangunan pendidikan pada jangka pendek karena merupakan cerminan dari partisipasi sekolah di periode berjalan. Kedua indikator ini kemudian diagregasikan menjadi indeks pendidikan dalam penghitungan IPM.

Dalam kurun 2010-2017, indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam kurun waktu tersebut, harapan lama sekolah di Gorontalo meningkat dari 11,12 tahun (2010) menjadi 13,01 tahun (2017). Harapan lama sekolah sebesar 13,01 tahun memiliki arti bahwa anak-anak usia 7 tahun di Gorontalo berpeluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga Diploma I. Peningkatan harapan lama sekolah tersebut dapat mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan partisipasi sekolah di Gorontalo yang berarti bahwa semakin banyak penduduk Gorontalo yang bersekolah.

Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Gorontalo meningkat dari 6,85 tahun (2010) menjadi 7,28 tahun (2017). Rata-rata lama sekolah sebesar 7,28 tahun memiliki arti bahwa pada tahun 2017 penduduk yang berusia 25 tahun atas di Gorontalo rata-rata telah menyelesaikan pendidikannya hingga kelas VII (SMP kelas II).

Gambar 3.5 Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Provinsi Gorontalo (tahun), 2010-2017

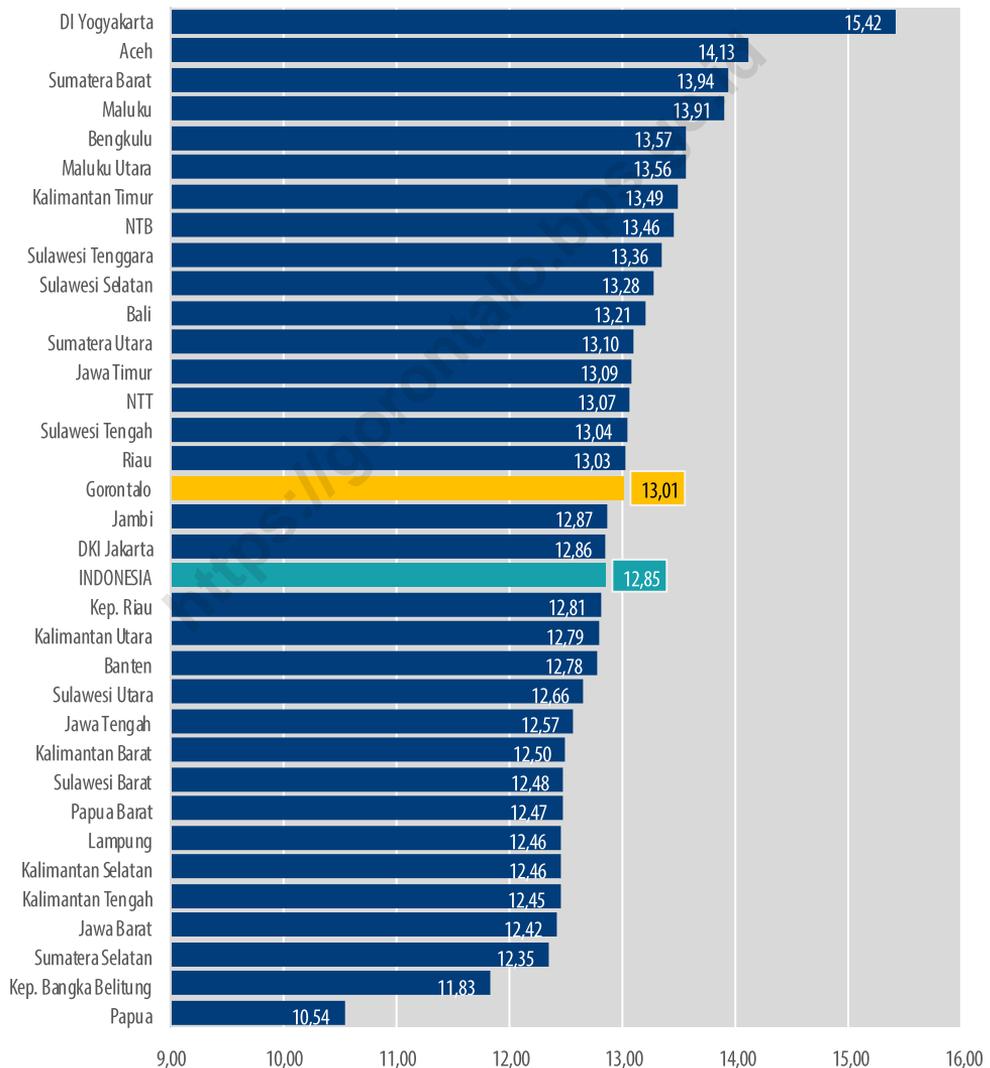


Sumber: BPS Provinsi Gorontalo

Meskipun kedua indikator pendidikan tersebut sama-sama meningkat, namun pertumbuhannya memiliki kecepatan yang berbeda. Tercatat, indikator harapan lama sekolah tumbuh lebih cepat dibandingkan indikator rata-rata lama sekolah. Harapan lama sekolah Gorontalo rata-rata tumbuh sebesar 2,28 persen per tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah tumbuh rata-rata sebesar 0,87 persen per tahun. Tampak dari Gambar 3.5, dimana peningkatan pada rata-rata lama sekolah cenderung lebih landai dibandingkan peningkatan pada harapan lama sekolah.

Jika dibandingkan dengan provinsi lain, capaian harapan lama sekolah Gorontalo tergolong cukup tinggi. Capaiannya pada tahun 2017 telah mencapai 13,01 tahun di atas capaian nasional yang sebesar 12,85 tahun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa secara nasional, partisipasi sekolah di Gorontalo relatif lebih tinggi dari capaian nasional.

Gambar 3.6 Harapan Lama Sekolah di 34 Provinsi (tahun), 2017



Sumber: BPS Provinsi Gorontalo

Harapan lama sekolah tertinggi dicapai oleh DI Yogyakarta, yaitu mencapai 15,42 tahun. Artinya, anak usia 7 tahun di DI Yogyakarta memiliki harapan atau peluang dapat bersekolah hingga 15,42 tahun atau setara dengan lulus Diploma III. Hal ini wajar, karena DI Yogyakarta yang merupakan Kota Pelajar memiliki banyak perguruan tinggi sehingga partisipasi sekolah di wilayah ini pun tinggi. Di sisi lain, Papua memiliki harapan lama sekolah terendah, yaitu sebesar 10,54 tahun yang berarti bahwa anak usia 7 tahun disana memiliki harapan bersekolah hingga 10,54 tahun atau setara dengan kelas I SMA.

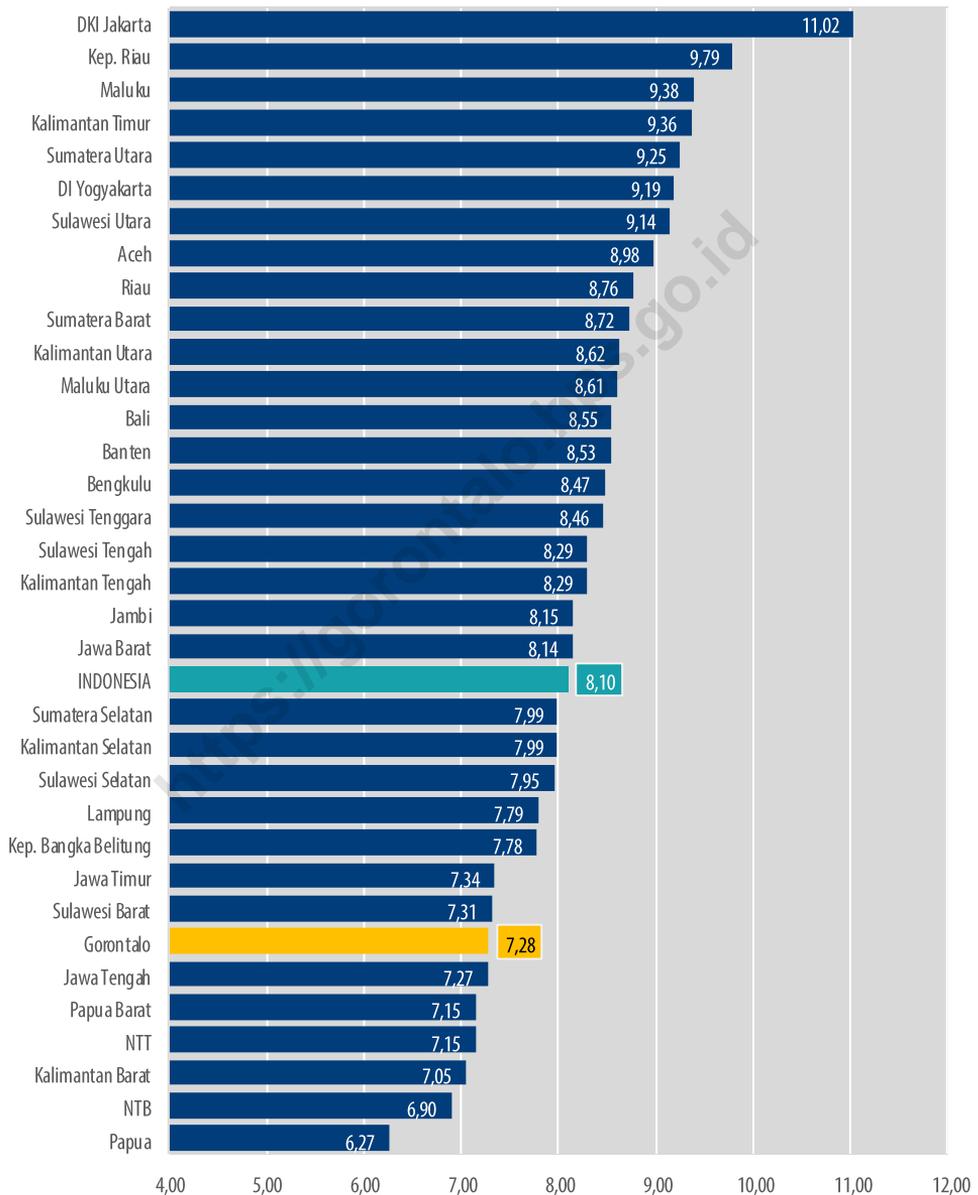
Di sisi lain, capaian rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Gorontalo masih tergolong rendah. Jika di harapan lama sekolah, Gorontalo berada di atas nasional, namun untuk rata-rata lama sekolah Gorontalo berada di bawah nasional. Artinya, tingkat pendidikan penduduk usia 25 tahun ke atas di Gorontalo lebih rendah dibandingkan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Indonesia pada umumnya.

Rata-rata lama sekolah di Gorontalo pada tahun 2017 adalah sebesar 7,28 tahun. Artinya, pada periode tersebut, penduduk usia 25 tahun ke atas di Gorontalo merupakan lulusan SMP kelas I. Sementara di level nasional, penduduk Indonesia usia 25 tahun ke atas pada umumnya merupakan lulusan SMP kelas II.

Meskipun capaian rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Gorontalo terus meningkat setiap tahunnya, namun selisih capaiannya mulai melebar dengan capaian nasional. Dalam kurun 2010-2017 rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Gorontalo bertambah sebesar 0,43 tahun, sementara capaian nasional bertambah sebesar 0,64 tahun pada periode yang sama. Artinya, pertumbuhan rata-rata lama sekolah di Gorontalo relatif lebih lambat dibandingkan nasional. Pertumbuhan rata-rata lama sekolah di Gorontalo hanya berkisar 0,87 persen per tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah secara nasional tumbuh hingga 1,18 persen per tahun.

Secara umum, capaian rata-rata lama sekolah provinsi-provinsi di kawasan Sulampua pada tahun 2017 memiliki deviasi yang cukup tinggi, yaitu berkisar antara 6,27 tahun (Papua) hingga 9,38 tahun (Maluku). Pada periode tersebut, terdapat lima provinsi di kawasan Sulampua yang memiliki capaian RLS di atas nasional, yaitu Sulawesi Tengah (8,29 tahun); Sulawesi Tenggara (8,46 tahun); Maluku Utara (8,61 tahun); Sulawesi Utara (9,14 tahun); dan Maluku (9,38 tahun).

Gambar 3.7 Rata-rata Lama Sekolah di 34 Provinsi (tahun), 2017



Sumber: BPS Provinsi Gorontalo

Dimensi Standar Hidup Layak

Sama dengan dimensi kesehatan dan pendidikan, pada dimensi standar hidup layak yang dicerminkan oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan, juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selama delapan tahun terakhir, pengeluaran per kapita yang disesuaikan penduduk Gorontalo meningkat sebesar Rp1,3 juta atau tumbuh sebesar 2,17 persen per tahun. Jika pada tahun 2010 pengeluaran per kapita penduduk Gorontalo hanya sekitar 8,2 juta rupiah per tahun, maka pada tahun 2017 sudah mencapai 9,53 juta rupiah per tahun. Sebagai catatan, pengeluaran per kapita di sini adalah pengeluaran per kapita dengan tahun dasar 2012 yang sudah disesuaikan antardaerah (pengeluaran perkapita disesuaikan).

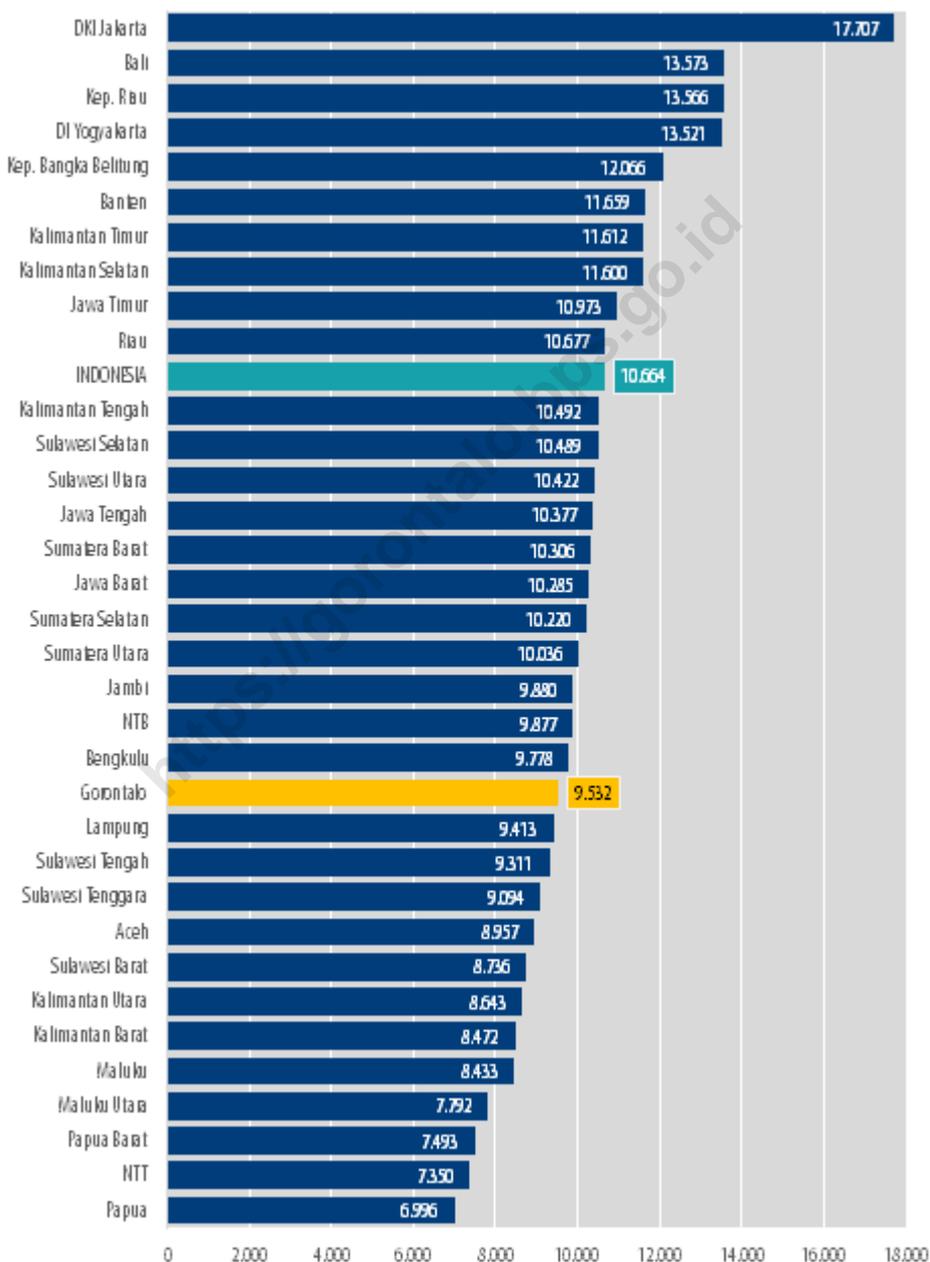
Gambar 3.8 Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan dan Pertumbuhannya Provinsi Gorontalo (ribu rupiah/kapita/tahun), 2010-2017



Sumber: BPS Provinsi Gorontalo

Secara nasional, pengeluaran per kapita yang disesuaikan di Provinsi Gorontalo masih tergolong rendah dan berada di bawah capaian rata-rata nasional. Pada tahun 2017, pengeluaran per kapita yang disesuaikan di Provinsi Gorontalo tercatat sebesar 9,53 juta rupiah per tahun. Nilai tersebut menempatkan Gorontalo berada di posisi 22 di antara 34 provinsi di Indonesia, berada di bawah Provinsi Bengkulu dengan pengeluaran per kapita 9,78 juta rupiah per tahun dan di atas Provinsi Lampung (Rp9,41 juta/kapita/tahun). Sementara secara nasional, rata-rata pengeluaran per kapita per tahun sudah mencapai 10,66 juta rupiah per kapita per tahun.

Gambar 3.9 Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan di 34 Provinsi di Indonesia (ribu rupiah/kapita/tahun), 2017



Sumber: BPS Provinsi Gorontalo

Kesenjangan dimensi standar hidup layak antarprovinsi di Kawasan Sulampua cukup lebar. Kondisi ini tercermin dari capaian pengeluaran per kapita masing-masing provinsi pada tahun 2017. Pada periode tersebut, pengeluaran per kapita di Papua hanya berkisar Rp6.996 ribu rupiah. Sementara itu, pada periode yang sama pengeluaran per kapita di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara sudah mencapai lebih dari 10 juta rupiah. Timpangnya pengeluaran per kapita tersebut salah satunya karena perbedaan laju pertumbuhan yang relatif jauh. Di Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan, laju pertumbuhan pengeluaran per kapita dalam delapan tahun terakhir masing-masing mencapai 2,15 persen dan 1,63 persen per tahun. Sementara Papua, dengan nilai pengeluaran per kapita yang relatif kecil, laju pertumbuhannya pun agak lebih lambat, yaitu hanya sekitar 1,01 persen pada periode yang sama.

<https://gorontalo.bps.go.id>

PERKEMBANGAN IPM KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI GORONTALO

4

<https://gorontalo.bps.go.id>



PERKEMBANGAN IPM KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI GORONTALO

4

Pembangunan Manusia di Level Kabupaten/Kota

Membaiknya capaian pembangunan manusia di level provinsi juga tercermin pada level kabupaten/kotanya. Setiap tahun IPM kabupaten/kota menunjukkan peningkatan. Terdapat 6 wilayah administrasi di Provinsi Gorontalo, yaitu Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, dan yang terakhir Kota Gorontalo. Hingga tahun 2017, IPM tertinggi masih dicapai oleh Kota Gorontalo dengan nilai sebesar 76,09. Pada periode yang sama, capaian terendah ditempati oleh Kabupaten Gorontalo Utara dengan IPM sebesar 63,52.

Gambar 4.1
Capaian IPM Kabupaten/Kota
di Provinsi Gorontalo, 2017

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo



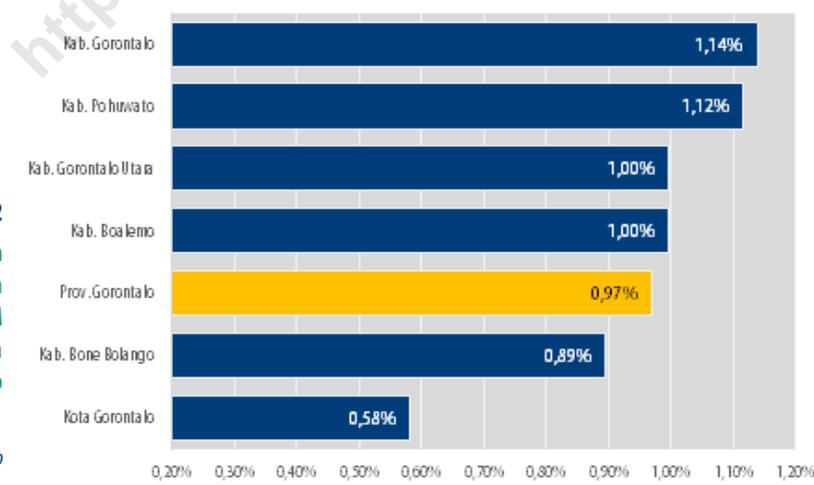
IPM sebesar 76,09 menjadikan Kota Gorontalo sebagai salah satu wilayah dengan IPM kategori “tinggi” di Indonesia. Sebagai pusat ibukota provinsi, Kota Gorontalo merupakan pusat dari seluruh kegiatan, baik pendidikan, perekonomian, bisnis, dan lain-lain. Hal inilah yang mendorong Kota Gorontalo mampu mencapai nilai IPM tertinggi di Provinsi Gorontalo. Sarana dan prasarana yang memadai, mempermudah penduduk Kota Gorontalo dalam memperoleh akses untuk pendidikan dan kesehatan yang layak. Oleh karena itu wajar jika level pembangunan manusia di Kota Gorontalo jauh di atas kabupaten lain di Provinsi Gorontalo.

Tabel 4.1 IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, 2010-2017

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kab. Boalemo	59,92	60,52	61,11	61,71	62,18	62,86	63,42	64,22
Kab. Gorontalo	60,00	61,04	61,87	62,22	62,90	63,63	64,22	64,95
Kab. Pohuwato	59,11	59,85	60,48	61,38	61,74	62,50	63,17	63,88
Kab. Bone Bolango	64,00	64,44	65,13	65,82	66,03	66,83	67,48	68,11
Kab. Gorontalo Utara	59,26	59,95	60,71	61,60	61,92	62,55	63,02	63,52
Kota Gorontalo	73,07	73,56	74,06	74,43	74,97	75,62	75,75	76,09

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo

Di sisi lain, pembangunan manusia lima kabupaten lain yang ada di Provinsi Gorontalo memiliki capaian yang relatif homogen. Level capaian pembangunan manusia di kelima kabupaten ini masuk ke dalam kategori “sedang” karena berkisar pada level 63,52 hingga 68,11. Selain itu, kecepatan pertumbuhan IPM per tahun selama delapan tahun terakhir juga relatif sama antarkabupaten. Kondisi inilah yang menyebabkan tidak ada kesenjangan yang signifikan di dalam pembangunan manusia pada level kabupaten di Provinsi Gorontalo sehingga menjadikan disparitas IPM antarkabupaten/kota relatif kecil.



Gambar 4.2
Rata-rata Pertumbuhan per Tahun Periode 2010-2017 IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo

Tingkat Kesenjangan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Mengecil

Pada hakikatnya, pembangunan nasional harus bersifat adil, demokratis, terbuka, partisipatif, dan terintegrasi. Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan manusia yaitu untuk memperluas pilihan bagi masyarakat. Masyarakat harus punya akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapus agar masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan memperoleh manfaat dari kesempatan-kesempatan ini. Artinya, semua penduduk dijamin oleh pemerintah untuk dapat memperluas pilihan-pilihannya tanpa membedakan.

Namun, berbagai macam faktor menyebabkan kemajuan pembangunan manusia menjadi berbeda-beda. Hal ini berdampak pada lahirnya kesenjangan pembangunan manusia. Kesenjangan pembangunan manusia yang muncul harus ditekan. Idealnya, setiap individu mempunyai kesempatan dan pilihan yang sama. Begitu pula dengan kesempatan dan pilihan yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Tentu saja hal tersebut harus merata di semua wilayah, di manapun mereka berada dan pada dimensi apapun. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mengatasi kesenjangan pembangunan termasuk pembangunan manusia, dimana pemerintah lebih berperan untuk menyediakan fasilitas dan melakukan koordinasi.

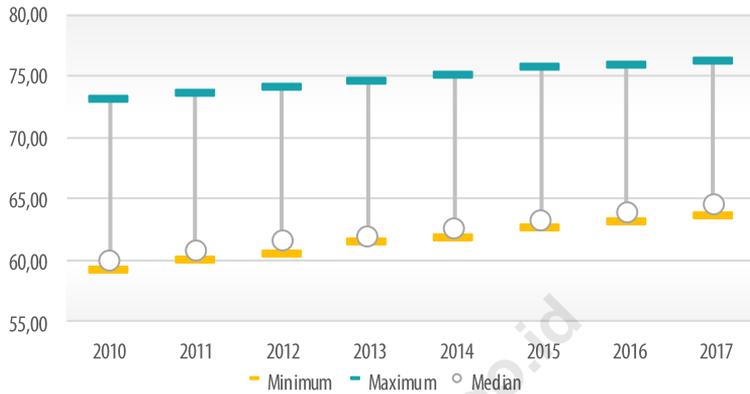
Secara nasional, tingkat kesenjangan pembangunan manusia antarkabupaten/kota di dalam Provinsi Gorontalo masih tergolong rendah. Provinsi Gorontalo menempati posisi keempat sebagai provinsi dengan disparitas IPM kabupaten/kota terkecil. Disparitas IPM kabupaten/kota terkecil dicapai oleh Provinsi Sulawesi Barat, sementara Provinsi Papua merupakan provinsi dengan tingkat disparitas IPM kabupaten/kota tertinggi.

Meskipun disparitas IPM kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo relatif kecil, namun median IPM-nya mengumpul di level IPM kategori sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$). Hal ini karena sebagian besar IPM kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo berkisar pada level 60-an. Hanya satu wilayah di Provinsi Gorontalo dengan nilai IPM di atas 70 (kategori tinggi), yaitu Kota Gorontalo.

Dalam kurun 2010-2017, tingkat kesenjangan IPM antarkabupaten/kota di Provinsi Gorontalo kian mengecil. Pada tahun 2010, selisih antara IPM yang terendah dengan yang tertinggi sebesar 13,96, sedangkan di tahun 2017 selisihnya mengecil menjadi 12,57. Jika pada tahun 2010 Kabupaten Pohuwato memiliki capaian IPM terendah, di tahun 2017 IPM terendah ditempati oleh Kabupaten Gorontalo Utara.

Gambar 4.3
Disparitas IPM
Kabupaten/Kota
di Provinsi Gorontalo ,
2010-2017

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo



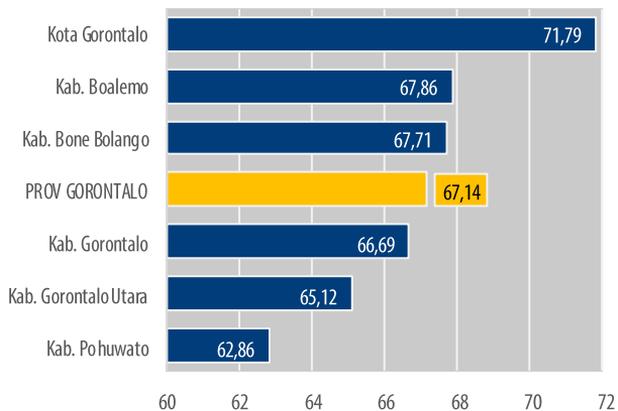
Dimensi Kesehatan Kabupaten/Kota

Secara umum capaian pada dimensi kesehatan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo menunjukkan peningkatan. Ditandai dengan capaian harapan hidup saat lahir yang tumbuh setiap tahunnya.

Pada dasarnya, harapan hidup saat lahir memiliki kecepatan pertumbuhan yang relatif rendah dan perlahan jika dibandingkan dengan dimensi lain dalam IPM. Hal ini karena meningkatkan umur harapan hidup saat lahir tidaklah mudah. Banyak faktor yang mempengaruhi indikator ini, salah satunya adalah pola hidup yang sehat. Untuk merubah pola hidup yang sehat pun tidak bisa tiba-tiba melainkan perlu proses pembiasaan dalam jangka waktu yang panjang pada masyarakat. Selama proses pembiasaan ini pun pemerinah daerah harus terus aktif dalam membimbing dan mensosialisasikan pola hidup sehat di masyarakat.

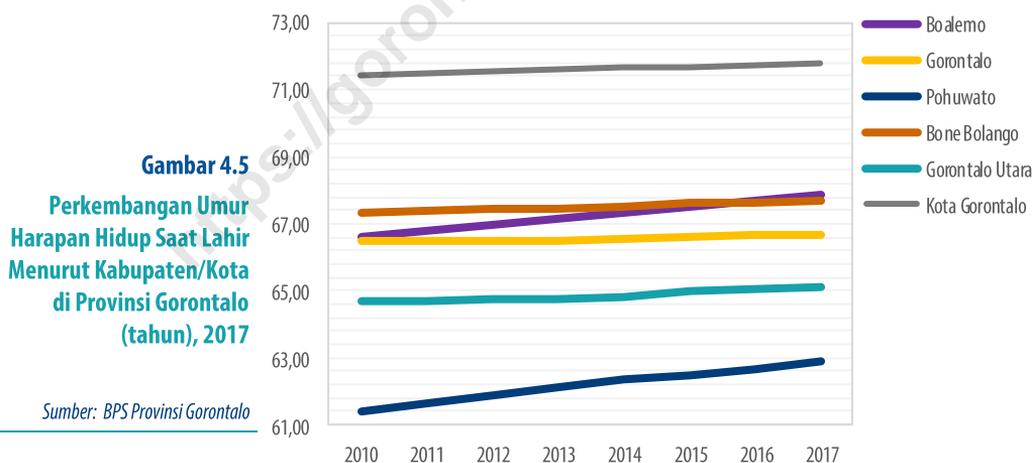
Gambar 4.4
Umur Harapan Hidup Saat Lahir
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi
Gorontalo (tahun), 2017

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo



Harapan hidup saat lahir tahun 2017 di level kabupaten/kota cukup beragam. Kota Gorontalo meraih harapan hidup saat lahir paling tinggi, yaitu mencapai 71,79 tahun. Artinya, di Kota Gorontalo, seorang bayi yang lahir memiliki harapan hidup hingga 71,79 tahun. Tingginya harapan hidup di Kota Gorontalo tentu dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan akses kesehatan yang sudah cukup baik di wilayah ini.

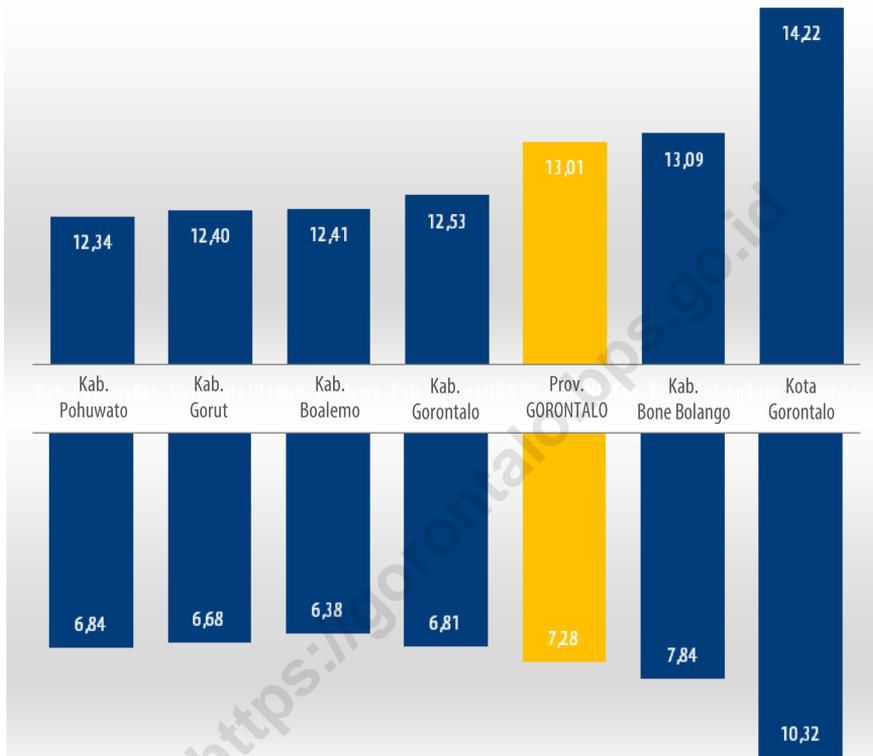
Sementara itu, harapan hidup saat lahir terendah ditempati oleh Kabupaten Pohuwato, yaitu sebesar 62,86 tahun. Meskipun capaian harapan hidup saat lahirnya terendah, namun Kabupaten Pohuwato terus berupaya mengejar ketinggalannya. Ditandai dengan kecepatan pertumbuhannya selama delapan tahun terakhir yang paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Gorontalo. Selama kurun waktu tersebut, UHH saat lahir Kabupaten Pohuwato tumbuh sebesar 0,34 persen per tahun, sementara kabupaten/kota lain tumbuh sekitar 0,05-0,27 persen per tahun. Kondisi tersebut tercermin dari Gambar 4.5, dimana peningkatan UHH Kabupaten Pohuwato terlihat lebih tinggi sedangkan kabupaten/kota lain peningkatannya relatif lebih landai.



Dimensi Pendidikan Kabupaten/Kota

Seperti pada dimensi kesehatan, capaian dimensi pendidikan juga menunjukkan peningkatan. Capaian yang diperoleh kabupaten/kota pun cukup beragam. Pada tahun 2017, harapan lama sekolah di tingkat kabupaten/kota berkisar antara 12,34 tahun (Kabupaten Pohuwato) hingga 14,22 tahun (Kota Gorontalo), sedangkan rata-rata lama sekolah berkisar antara 6,38 tahun (Kabupaten Boalemo) hingga 10,32 tahun (Kota Gorontalo).

Gambar 4.6 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo (tahun), 2010-2017

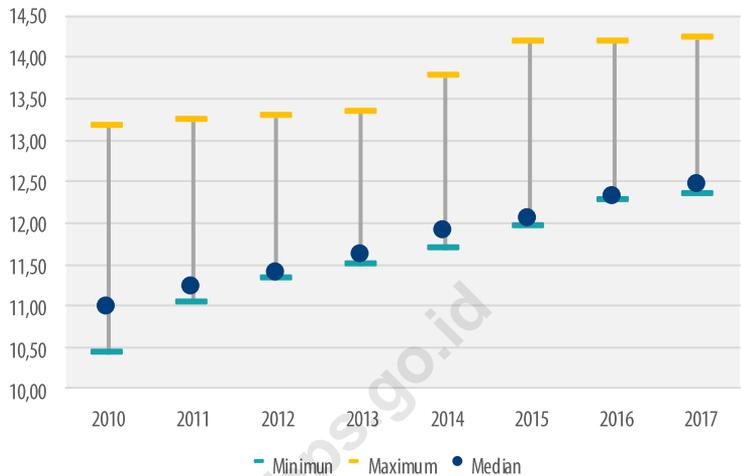


Sumber: BPS Provinsi Gorontalo

Meskipun sama-sama mengalami peningkatan, terdapat pola yang berbeda antara perkembangan pada harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di level kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo. Harapan lama sekolah yang dicapai oleh kabupaten/kota cenderung jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata lama sekolah. Variasi capaiannya pun berbeda, pada indikator rata-rata lama sekolah variasinya cenderung lebih tinggi dibandingkan harapan lama sekolah. Pada indikator harapan lama sekolah selisih antara capaian yang tertinggi dan terendah hanya sebesar 1,88 tahun. Sementara pada rata-rata lama sekolah, selisihnya mencapai 3,94 tahun.

Gambar 4.7
Perkembangan Disparitas Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo (tahun), 2010-2017

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo



Dalam kurun 2010-2017, variasi harapan lama sekolah cenderung menurun. Di tahun 2010, selisih harapan lama sekolah antara yang tertinggi dengan yang terendah adalah sebesar 2,76 tahun, sedangkan di tahun 2017 selisihnya menurun menjadi 1,88 tahun. Di sisi lain, variasi pada rata-rata lama sekolah cenderung stagnan. Di tahun 2010, selisih rata-rata lama sekolah antara yang tertinggi dengan yang terendah sebesar 3,88 tahun, di tahun 2017 selisihnya sebesar 3,94 tahun.

Variasi yang cukup tinggi pada rata-rata lama sekolah terjadi karena beberapa faktor. Tingginya variasi rata-rata lama sekolah di tingkat kabupaten/kota secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pembangunan pendidikan di tingkat kabupaten/kota pada masa lampau masih belum merata pembangunan pendidikan pada periode berjalan. Selain itu, kondisi ini pun bisa terjadi karena adanya faktor migrasi, dimana penduduk dengan tingkat pendidikan yang tinggi di wilayah kabupaten bermigrasi ke wilayah Kota Gorontalo untuk mencari pekerjaan. Perlu ada kajian lebih dalam untuk melihat ini.

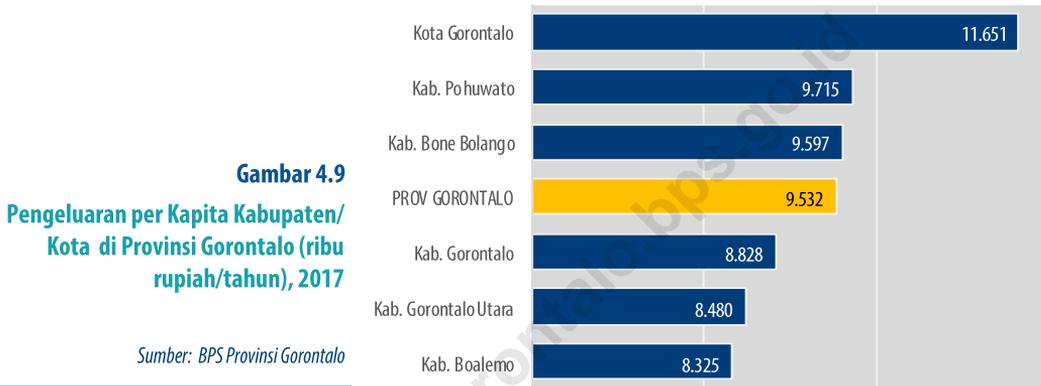
Gambar 4.8
Perkembangan Disparitas Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo (tahun), 2010-2017

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo

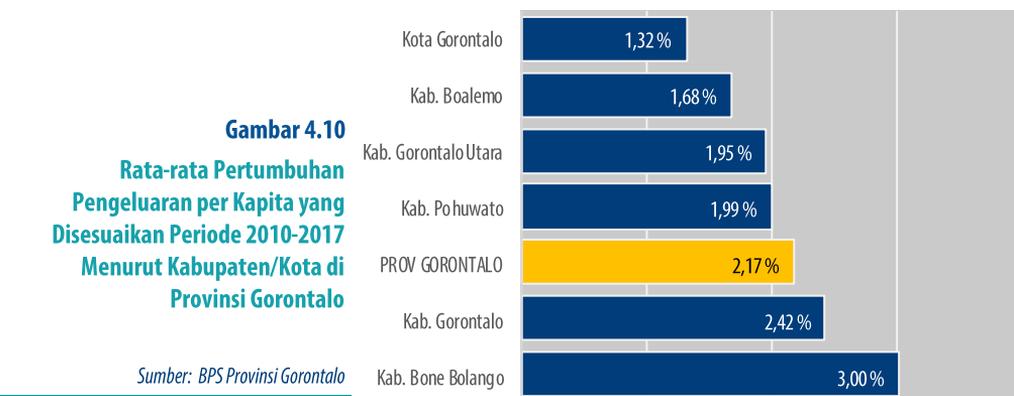


Dimensi Hidup Layak Kabupaten/Kota

Dimensi pembangunan manusia dari sisi ekonomi yang diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan, menempatkan Kota Gorontalo di posisi tertinggi dengan capaian sebesar 11,65 juta rupiah per kapita per tahun. Cukup jauh dengan yang dicapai oleh Kabupaten Boalemo dengan pengeluaran per kapita sebesar 8,32 juta per tahun.



Selama delapan tahun terakhir (2010-2017), pertumbuhan pengeluaran per kapita yang disesuaikan di tingkat kabupaten/kota memiliki kecepatan yang beragam. Kabupaten Bone Bolango yang wilayah geografisnya sangat berdekatan dengan Kota Gorontalo, memiliki pertumbuhan paling cepat yaitu sebesar 3,00 persen per tahun. Wilayahnya yang berdekatan dengan Kota Gorontalo yang merupakan pusat perekonomian, dan persebaran penduduknya yang mengumpul di daerah perkotaan menjadikan pertumbuhan pengeluaran per kapitanya melaju lebih cepat dibandingkan kabupaten lain. Di sisi lain, Kota Gorontalo justru memiliki pertumbuhan yang paling lambat, yaitu sebesar 1,32 persen per tahun. Hal ini wajar karena nilai pengeluaran per kapita di Kota sudah relatif tinggi dan jauh di atas kabupaten lain di Provinsi Gorontalo.



Tabel 4.2 IPM Kabupaten/Kota Menurut Komponen di Provinsi Gorontalo, 2016-2017

Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup (tahun)		Harapan Lama Sekolah (tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		IPM	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kab. Boalemo	67,67	67,86	12,34	12,41	6,30	6,38	7.895	8.325	63,42	64,22
Kab. Gorontalo	66,66	66,69	12,31	12,53	6,64	6,81	8.589	8.828	64,22	64,95
Kab. Pohuwato	62,65	62,86	12,28	12,34	6,67	6,84	9.381	9.715	63,17	63,88
Kab. Bone Bolango	67,65	67,71	13,05	13,09	7,81	7,84	9.115	9.597	67,48	68,11
Kab. Gorontalo Utara	65,06	65,12	12,26	12,40	6,62	6,68	8.270	8.480	63,02	63,52
Kota Gorontalo	71,74	71,79	14,19	14,22	10,30	10,32	11.360	11.651	75,75	76,09

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo

KOMPONEN IPM GORONTALO 2010-2017



Angka Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun)



Harapan Lama Sekolah (Tahun)



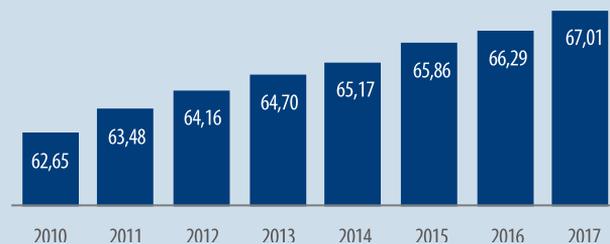
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)



Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)



IPM



KESIMPULAN

5

<https://gorontalo.bps.go.id>



Dari hasil pengamatan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Gorontalo, baik secara tren 2010-2017 maupun spasialnya, didapat beberapa kesimpulan diantaranya:

- ◆ Tren pembangunan manusia di Provinsi Gorontalo semakin meningkat setiap tahunnya. Capaian IPM Gorontalo pada tahun 2017 adalah 67,01 dengan pertumbuhan sebesar 1,09 persen dibandingkan tahun 2016.
- ◆ Peningkatan terjadi pada seluruh komponen IPM yaitu:
 1. Komponen kesehatan, ditunjukkan dengan meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir dari 67,13 tahun (2016) menjadi 67,14 tahun (2017) atau tumbuh sebesar 0,01 persen.
 2. Komponen pendidikan, ditunjukkan dengan meningkatnya angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dari 12,88 tahun (2016) menjadi 13,01 tahun (2017) atau tumbuh sebesar 1,01 persen. Sementara Rata-rata Lama Sekolah dari 7,12 (2016) menjadi 7,28 (2017) atau tumbuh sebesar 2,25 persen.
 3. Komponen ekonomi, ditunjukkan dengan meningkatnya pengeluaran per kapita menjadi 9,53 juta rupiah per tahun pada tahun 2017 (tumbuh 3,89 persen) dibanding tahun 2016 (Rp9,18 juta/kapita/tahun).
- ◆ Pada level kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo tahun 2017:
 1. Capaian IPM tertinggi diraih oleh Kota Gorontalo yaitu sebesar 76,09 dan masuk dalam kategori “tinggi”. Sementara capaian terendah berada di Kabupaten Gorontalo Utara (63,52) dengan capaian IPM yang berstatus “sedang”.
 2. Pertumbuhan IPM tercepat dicapai oleh Kabupaten Gorontalo (1,14%), sedangkan yang tumbuh paling lambat adalah Kota Gorontalo (0,58%).
 3. Indikator UHH saat lahir tertinggi dicapai Kota Gorontalo (71,79 tahun) dan terendah di Kabupaten Pohuwato (62,86 tahun).
 4. Indikator angka Harapan Lama Sekolah (HLS) tertinggi dicapai oleh Kota Gorontalo (14,22 tahun) dan terendah di Kabupaten Pohuwato (12,34 tahun).

5. Indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tertinggi dicapai oleh Kota Gorontalo (10,32 tahun) dan terendah di Kabupaten Boalemo (6,38 tahun).
6. Indikator pengeluaran per kapita disesuaikan tertinggi dicapai oleh Kota Gorontalo (Rp11,65 juta) dan terendah di Kabupaten Boalemo (Rp8,32 juta).

<https://gorontalo.bps.go.id>

- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. 2013. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2012. Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. 2013. Statistik Indonesia 2013. Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. 2014. Statistik Indonesia 2013. Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. 2014. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2013. Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. 2015. Indeks Pembangunan Manusia 2014. Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. 2015. Statistik Indonesia 2014. Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. 2015. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2014. Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. 2016. Indeks Pembangunan Manusia 2015. Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. 2016. Statistik Indonesia 2015. Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. 2016. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2015. Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
- Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo. 2017. Keadaan Pekerja di Provinsi Gorontalo 2016. Gorontalo: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo
- Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo. 2017. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2016. Gorontalo: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo
- Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo. 2017. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2017. Gorontalo: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo
- United Nations Development Programme*. 2015. *Human Development Report*. New York: UNDP.

KONSEP PEMBANGUNAN MANUSIA

“Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan yang sederhana. Tetapi hal ini seringkali terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang.”

Kalimat pembuka pada *Human Development Report* (HDR) pertama yang dipublikasikan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) tahun 1990 secara jelas menekankan arti pentingnya pembangunan yang berpusat pada manusia—yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir, dan bukan sebagai alat pembangunan.

Konsep ini terdengar berbeda dibanding konsep klasik pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan manusia memperluas pembahasan tentang konsep pembangunan dari diskusi tentang cara-cara pertumbuhan ekonomi ke diskusi tentang tujuan akhir dari pembangunan. Pembangunan manusia juga merupakan perwujudan jangka panjang, yang meletakkan pembangunan di sekeliling manusia, dan bukan manusia di sekeliling pembangunan.

Mengutip isi HDR pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.

Untuk menghindari kekeliruan dalam memaknai konsep ini, perbedaan antara cara pandang pembangunan manusia terhadap pembangunan dengan pendekatan konvensional yang menekankan pertumbuhan ekonomi, pembentukan modal manusia, pembangunan sumber daya manusia, kesejahteraan rakyat, dan pemenuhan kebutuhan dasar, perlu diperjelas. Konsep pembangunan manusia mempunyai cakupan yang lebih luas dari teori konvensional pembangunan ekonomi.

Model ‘pertumbuhan ekonomi’ lebih menekankan pada peningkatan PNB daripada memperbaiki kualitas hidup manusia. ‘Pembangunan sumber daya manusia’ cenderung untuk memperlakukan manusia sebagai input dari proses produksi—sebagai alat, bukan sebagai tujuan akhir. Pendekatan ‘kesejahteraan’ melihat manusia sebagai penerima dan bukan sebagai agen dari perubahan dalam proses pembangunan. Adapun pendekatan ‘kebutuhan dasar’ terfokus pada penyediaan barang-barang dan jasa-jasa untuk kelompok masyarakat tertinggal, bukannya memperluas pilihan yang dimiliki manusia di segala bidang.

Pendekatan pembangunan manusia menggabungkan aspek produksi dan distribusi komoditas, serta peningkatan dan pemanfaatan kemampuan manusia. Pembangunan manusia melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat (pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik ataupun nilai-nilai kultural) dari sudut pandang manusia. Pembangunan manusia juga mencakup isu penting lainnya, yaitu gender. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua sektor.

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (*Purchasing Power Parity*). Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Angka Harapan Hidup saat Lahir

Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Penghitungan angka harapan hidup melalui pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Paket program *Mortpack* digunakan untuk menghitung angka harapan hidup berdasarkan input data ALH dan AMH. Selanjutnya, dipilih metode *Trussel* dengan model *West*, yang sesuai dengan histori kependudukan dan kondisi Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara umumnya (Preston, 2004).

Indeks harapan hidup dihitung dengan menghitung nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, yaitu angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 20 tahun.

Tingkat Pendidikan

Salah satu komponen pembentuk IPM adalah dari dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) dan harapan lama sekolah (*expected years of schooling*). Pada proses pembentukan IPM, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah diberi bobot yang sama, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pendidikan sebagai salah satu komponen pembentuk IPM.

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun.

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Batas maksimum untuk harapan lama sekolah adalah 18 tahun, sedangkan batas minimumnya 0 (nol).

Standar Hidup Layak

Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purcashing power parity*) berbasis fomula Rao.

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{P_{ij}}{P_{ik}} \right)^{\frac{1}{m}}$$

Keterangan:

- PPP_j : paritas daya beli di wilayah j
- P_{ij} : harga komoditas i di kabupaten/kota j
- P_{ik} : harga komoditas i di Jakarta Selatan
- m : jumlah komoditas

Penghitungan paritas daya beli dilakukan berdasarkan 96 komoditas kebutuhan pokok seperti terlihat dalam Tabel L1. Batas maksimum dan minimum penghitungan pengeluaran per kapita yang digunakan dalam penghitungan IPM seperti terlihat dalam Tabel L2. Batas maksimum pengeluaran per kapita adalah sebesar Rp26.572.352 sementara batas minimumnya adalah Rp1.007.436.

Tabel L1 Komoditi Kebutuhan Pokok (Makanan) sebagai Dasar Penghitungan Daya Beli atau Purchasing Power Parity(PPP)

Makanan			
Beras	Susu bubuk bayi	Minyak kelapa	Lontong/ketupat sayur
Tepung terigu	Bayam	Minyak goreng lainnya	Soto/gule/sop/rawon/cincang
Ketela pohon/singkong	Kangkung	Kelapa	Sate/tongseng
Kentang	Kacang panjang	Gula pasir	Mie bakso/mie rebus/mie goreng
Tongkol/tuna/cakalang	Bawang merah	Teh	Makanan ringan anak
Kembung	Bawang putih	Kopi	Ikan (goreng/bakar dll)
Bandeng	Cabe merah	Garam	Ayam/daging (goreng dll)
Mujair	Cabe rawit	Kecap	Makanan jadi lainnya
Mas	Tahu	Penyedap makanan/vetsin	Air kemasan galon
Lele	Tempe	Mie instan	Minuman jadi lainnya
Ikan segar lainnya	Jeruk	Kue kering	Es lainnya
Daging sapi	Mangga	Kue basah	Rokok kretek filter
Daging ayam ras	Salak	Makanan gorengan	Rokok kretek tanpa filter
Daging ayam kampung	Pisang ambon	Gado-gado/ketoprak	Rokok putih
Telur ayam ras	Pisang raja	Nasi campur/rames	
Susu kental manis	Pisang Lainnya	Nasi goreng	
Susu bubuk	Pepaya	Nasi putih	
Non Makanan			
Rumah sendiri/bebas sewa	Lainnya/batu baterai, aki, korek, obat nyamuk, dll	Praktik dokter/poliklinik	Alas kaki
Rumah kontrak	Perlengkapan mandi	SPP	Minyak Pelumas
Rumah sewa	Barang kecantikan	Bensin	Meubel air
Rumah dinas	Perawatan kulit, muka, kuku, rambut	Transportasi/pengangkutan umum	Peralatan rumah tangga
Listrik	Sabun cuci	Pos dan Telekomunikasi	Peralatan perabot rumah tangga
Air PAM	Biaya RS Pemerintah	Pakaian jadi laki-laki dewasa	Alat-alat Dapur/Makan
LPG	Biaya RS Swasta	Pakaian jadi perempuan dewasa	
Minyak tanah	Puskesmas/pustu	Pakaian jadi anak-anak	

Penyusunan Indeks IPM

Sebelum menghitung IPM, setiap komponen IPM harus dihitung indeksinya. Formula yang digunakan dalam penghitungan indeks komponen IPM adalah sebagai berikut:

$$I_{UHH} = \frac{UHH - UHH_{\min}}{UHH_{\max} - UHH_{\min}} \quad (2)$$

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}} \quad (3)$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}} \quad (4)$$

$$I_{\text{pengetahuan}} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2} \quad (5)$$

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\max}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})} \quad (6)$$

Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum seperti terlihat dalam Tabel L2.

Tabel L2 Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen IPM

Komponen IPM	Satuan	Minimum	Maksimum
Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Tahun	20	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	15
Pengeluaran per Kapita	Tahun	1.007.436	26.572.352

Keterangan:

* Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua

** Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN), yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

Selanjutnya nilai IPM dapat dihitung sebagai:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{AHH} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100 \quad (7)$$

Status Pembangunan Manusia

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia.

1. Kelompok “sangat tinggi” : $IPM \geq 80$
2. Kelompok “tinggi” : $70 \leq IPM < 80$
3. Kelompok “sedang” : $60 \leq IPM < 70$
4. Kelompok “rendah” : $IPM < 60$

Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara perubahan capaian terkini dengan capaian tahun sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan IPM, maka semakin cepat pula peningkatan IPM. Indikator pertumbuhan IPM ini dapat digunakan sebagai kinerja pembangunan manusia suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{IPM_t - IPM_{t-1}}{IPM_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

IPM_t : IPM suatu wilayah pada tahun t

$IPM_{(t-1)}$: IPM suatu wilayah pada tahun (t-1)

<https://gorontalo.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI GORONTALO**

Jl. Prof. DR. Aloi Saboe No. 117 Gorontalo
Telp. (0435) 834596, Fax. (0435) 834597
Email: bps7500@bps.go.id
Web: Gorontalo.bps.go.id

